



**EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN
MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA
PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat–Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KHOIRUL ANWAR NASUTION
NIM. 19 402 00098**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN
MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA
PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat–Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KHOIRUL ANWAR NASUTION
NIM. 19 402 00098**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN
MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA
PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

KHOIRUL ANWAR NASUTION

NIM. 19 402 00098

Pembimbing I

H. KSWADI LUBIS., S.E., M.Si.
NIP.196301071999031002

Pembimbing II

FERRI ALFADRI., S.E.I., M.E.
NIP.199409282020121007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2023

Hal : Skripsi
An.KHOIRULANWAR NASUTION

Padangsidempuan, 03 Oktober 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Khoirul Anwar Nasution yang berjudul *Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

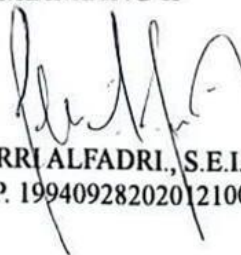
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



H. ASWADI LUBIS., S.E M.Si.
NIP. 196301071999031002

PEMBIMBING II



FERRI ALFADRI., S.E.I.,M.E.
NIP. 199409282020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

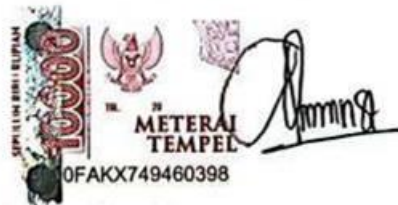
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khoirul Anwar Nasution**
NIM : 19 402 00098
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02 Oktober 2023
Saya yang Menyatakan,



Khoirul Anwar Nasution
NIM. 19 402 00098

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anwar Nasution
NIM : 19 402 00098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relenvansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Yang menyatakan,




METERAI
TEMPEL
DDAKX651624984

Khoirul Anwar Nasution
NIM. 19 402 00098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : KHOIRUL ANWAR NASUTION
NIM : 19 402 00098
FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

H. Aswadi Lubis, M.Si
NIDN. 2007016301

Ferri Alfadri, M.E.
NIDN. 2028099401

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : 09 November 2023
Pukul : 14.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 71,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,43
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan
Relavansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam
Perspektif Ekonomi Syariah**
NAMA : Khoirul Anwar Nasution
NIM : 19 402 00098

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 20 Desember 2023



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. †
NIP. 19780818 200901 1015

ABSTRAK

Nama : Khoirul Anwar Nasution
Nim : 19 402 00098
Judul Skripsi : **Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perekonomian Indonesia telah mengalami kelesuan ekonomi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia.

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan dan membumikan Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, yang mana digunakan untuk meneliti objek yang ilmiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta dengan adanya koperasi, Hatta jelas sangat memperhatikan keberadaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain. Hal itu terbukti *Pertama*, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota, *Kedua*, menciptakan lapangan pekerjaan, *Ketiga*, meningkatkan taraf hidup masyarakat, *Keempat*, turut mencerdaskan bangsa, dimana dalam koperasi ini bukan hanya kegiatan material saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan bagi para anggota, *Kelima*, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha.

Kata Kunci : *Ekonomi Kerakyatan, Relevansi, Mohammad Hatta, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Name : Khoirul Anwar Nasution
Number : 19 402 00098
Thesis Title : *People's Economy, Mohammad Hatta's Thoughts and Its Relevance to the Indonesian Economy from a Sharia Economic Perspective.*

This research is motivated by the fact that the Indonesian economy has experienced an economic downturn which has had an impact on slowing economic growth. This research aims to find out and describe the views of Sharia Economics regarding Popular Economics, Mohammad Hatta's Thoughts and their Relevance to the Indonesian Economy.

The theoretical benefits of the results of this research are expected to improve understanding and increase knowledge as well as to understand the views of Sharia Economics regarding the People's Economy of Mohammad Hatta's Thoughts and their Relevance to the Indonesian Economy. In practice, it is hoped that this research can be used as material to develop and ground Mohammad Hatta's people's economic thinking.

The research in this thesis is qualitative research, namely research based on postpositivism/interpretive philosophy, which is used to research scientific objects. The results of qualitative research emphasize meaning rather than generalizations.

Based on the research results, it can be concluded that the economic thought initiated by Mohammad Hatta with the existence of cooperatives, Hatta clearly paid great attention to the economic existence of the people, such as farmers, fishermen, laborers, small traders and others. This has been proven: First, cooperatives can increase members' income, Second, create jobs, Third, improve people's living standards, Fourth, help educate the nation, where in this cooperative it is not only material activities, but also educational activities for members, Fifth, unite and develop business power.

Keywords: *People's Economy, Relevance, Mohammad Hatta, Sharia Economics*

خلاصة

الاسم : خيرول أنور ناسوتيون

الرقم : ١٩٤٠٢٠٠٠٩٨

عنوان الرسالة : الاقتصاد الشعبي، أفكار محمد حتا وارتباطها بالاقتصاد الإندونيسي من منظور اقتصادي شرعي.

الدافع وراء هذا البحث هو حقيقة أن الاقتصاد الإندونيسي قد شهد انكماشًا اقتصاديًا كان له تأثير على تباطؤ النمو الاقتصادي. يهدف هذا البحث إلى معرفة ووصف آراء الاقتصاديين الشرعيين فيما يتعلق بالاقتصاد الشعبي لأفكار محمد حتا وارتباطها بالاقتصاد الإندونيسي. ومن المتوقع أن تؤدي الفوائد النظرية لنتائج هذا البحث إلى تحسين الفهم وزيادة المعرفة وكذلك فهم آراء اقتصاديات الشريعة فيما يتعلق بالاقتصاد الشعبي لأفكار محمد حتا وصلتها بالاقتصاد الإندونيسي. ومن الناحية العملية، من المأمول أن يتم استخدام هذا البحث كمادة لتطوير وترسيخ الفكر الاقتصادي لشعب محمد حتا.

البحث في هذه الأطروحة هو بحث نوعي، أي البحث المبني على الفلسفة ما بعد الوضعية/التفسيرية، والذي يستخدم للبحث في الأشياء العلمية، وتؤكد نتائج البحث النوعي على المعنى بدلاً من التعميمات.

وبناء على نتائج البحث يمكن استنتاج أن الفكر الاقتصادي الذي بدأه محمد حتا مع وجود التعاونيات، من الواضح أن حتا أولى اهتمامًا كبيرًا بالوجود الاقتصادي للشعب، مثل المزارعين والصيادين والعمال وصغار التجار وغيرهم. وقد تم إثبات ذلك: أولاً، يمكن للتعاونيات زيادة دخل الأعضاء، ثانيًا، خلق فرص العمل، ثالثًا، تحسين مستويات معيشة الناس، رابعًا، المساعدة في تثقيف الأمة، حيث لا يقتصر الأمر في هذه التعاونية على الأنشطة المادية فحسب، بل أيضًا على الأنشطة التعليمية للأعضاء خامسًا، توحيد وتطوير القوة التجارية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الشعبي، الملاءمة، محمد حتا، الاقتصاد الشرعي

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yangtelah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorangpemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapanbeserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relenvansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi,M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

- Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. H. Armyn Hasibuan, S.Ag selaku Wakil Dekan bidang Administrasi umum, Perencanaan dan keuangan,, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan. Ibu Nofinawati, S.E.I. MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
 3. Ibu Delima Sari, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 4. Bapak H. Aswadi Lubis., S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Ferri Alfadri., S.E.I., M.E. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang

telah Bapak/Ibu berikan. Peneliti sangat berterima kasih atas kebaikan dan ilmu serta bantuan yang begitu berharga kepada peneliti.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Salman Nasution dan Ibunda Nurhaida Rangkuti yang saya sayangi yang tidak pernah lelah dalam mendukung peneliti dan doa kedua orang tua berikan yang terus mengalir dan mengiringi setiap langkah peneliti dalam menghadapi beratnya kehidupan ini tanpa pernah mengeluh dengan apa pun yang peneliti raih dan selalu mengapresiasi setiap kerja keras peneliti, kedua orang tua yang tanpa lelah memberikan kebahagiaan dan sumber kebahagiaan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak akan habis rasa terimakasih yang terus peneliti ucapkan untuk setiap kebahagiaan kepada kedua orang tua berikan kepada peneliti, hanya satu harapan peneliti semoga kedua orang tua selalu bahagia dan sehat selalu serta berada dalam lindungan Allah SWT, Amin ya Allah, Kabulkanlah. Dan kepada saudaraku tersayang Devi Handayani Nasution, Ariandi,

Muhammad Aswin Nasution, Aisyah Harahap, dan keponakan ku tersayang Muhammad Raffa Alfakhri dan Aghnia Kayla Nasution dan keluarga tercinta harta yang paling berharga yang peneliti miliki yang menjadi penyemangat serta alasan yang membuat peneliti untuk terus maju dan terus berjuang tanpa ada rasa lelah dalam mendukung.

8. Kepada berbagai pihak keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, peneliti mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu keluarga berikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kepada sahabatku Siti Asiah Hasibuan, Ratika Sandra Amelia, Atala Rania Insyirah dan zakia Ritonga terimakasih telah menjadi penghibur dikala rasa penat dan lelah yang melanda peneliti dalam proses perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi idola yang mengajarkan perjuangan dan pentingnya menghargai diri sendiri selalu memberi senyuman dan menjadi kebahagiaan bagi orang lain dengan menebar semangat dan kebaikan.
10. Teman-temanku Mahmul Ansori, Nisfu Ramadhan Siregar, Royhan Malik Pulungan, Rahman Sihombing, Rabiul Alif Marasandi Harahap, Ramli Hasibuan dan Andre yang selalu memberikan semangat dan motivasikepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Dan kepada berbagai pihak yang selalu membantu peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu peneliti ucapkan terimakasih untuk bantuan dan kerja samanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Wassalaamu'alaikumWr.Wb

Padangsidempuan, Oktober 2023
Peneliti,

Khoirul Anwar Nasution
NIM. 19 402 00089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN



A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا ...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu ﺝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makayang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan.....	14
B. Substansi Ekonomi Kerakyatan	17
C. Prinsip dan Nilai Ekonomi Kerakyatan.....	19
D. Koperasi dan UMKM Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan....	20
E. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta	23
F. Pengertian Relevansi	25
G. Pengertian Ekonomi Syariah.....	26
H. Pengertian Ekonomi Islam	27
I. Pengertian Teori Ekonomi Islam.....	29
J. Perekonomian Indonesia dalam Islam.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	41
C. Objek dan Subjek penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Tokoh	47
B. Analisis Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta	62
C. Analisis Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah	66
D. Relevansi Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Penelitian Terdahulu	7
---------	------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia, pada masa awal peradabannya, masih sangat terbatas dan juga masih bersifat sederhana tetapi seiring dengan semakin majunya Tingkat peradaban, semakin banyak dan bervariasi pula kebutuhan manusia. Sementara di sisi lain alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas adanya. Ketidakeimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas ini, pada yang mengatur hal tersebut, ilmu ini dikenal dengan ilmu ekonomi.

Namun pada masa itu ekonomi masih belum menjadi sebuah disiplin ilmu.¹ Ekonomi pada saat itu hanya masih dalam tahap wacana dan berupa pemikiran-pemikiran individu. Ekonomi baru menjadi disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku *An inquiry into the nature an causes of the wealth of nations* pada tahun 1776.²

Kemudian dengan dimulainya abad ke-20 bertambah pula peranan ekonomi dalam kehidupan, berbagai bangsa mulai mengambil studi ekonomi dalam bentuk-bentuk yang baru. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terbentuknya kajian-kajian ekonomi yang baru dengan terpecahnya berbagai macam pandangan dari beberapa teori ekonomi. Madzhab ekonomi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu madzhab ekonomi kapitalis dan madzhab ekonomi sosialis. Dalam aktivitasnya

¹Dealiarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik ingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Astarus Jakarta, 2005)

kedua mazhab ini sibuk mengkampanyekan kesejahteraan dan kemakmuran kepada dunia. Keduanya saling memperebutkan pengaruh dan mengklaim satu sama lain bahwa mazhab mereka masing-masinglah yang paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Tak jarang dalam mengkampanyekan ide-ide tersebut kedua mazhab ini harus berhadapan satu sama lain dalam posisi yang diametral, bahkan sampai meruncing, dan merembet ke masalah politik hingga konflik.

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, meskipun begituousaha dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.³ Berangkat dari kegagalan-kegagalan tersebut, maka mulai bermunculan berbagai ekonomi alternatif, diantaranya gagasan ekonomi yang berdasarkan kerakyatan yang kita kenal dengan nama ekonomi kerakyatan, dan ekonomi yang berdasarkan islam, yang kita kenal dengan nama ekonomi islam. Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamkan.

Hal ini terbukti dalam kondisi kritis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998 dimana ekonomi kerakyatan berperan dalam membantuousaha kecil,

³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, (Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf, 1995)

menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di sektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa UKM dan koperasi sangat berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas terutama di masa krisis. Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengar dari pengalaman ketika krisis tahun 1997-1998, dalam krisis tersebut usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan di sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi.⁴

Hal yang menjadi pokok ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat. Dalam dunia pendidikan, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan

⁴Noer Sutrisno, *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: STEKPI, 2005), h. 5-7

dan perkembangan masyarakat.⁵ Relevansi secara umum adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau suatu hal yang saling berhubungan, relevansi bisa diartikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang, penulis, atau peneliti dalam memecahkan kebutuhan akan informasi.⁶

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti, yaitu yang pertama adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) dan yang kedua adalah sudut pandang atau pandangan.⁷ Dalam pemikiran Bung Hatta, perspektif dalam membangun ekonomi adalah ekonomi yang dibangun oleh rakyat.⁸ Bung Hatta adalah seorang proklamator, ekonom, dan pejuang. Bung Hatta tidak hanya membantu menginternalisasikan konsep ini untuk menyelenggarakan negara yang merdeka secara konstitusional. Pemikirannya juga berperan sangat penting dalam meletakkan dasar bagi terwujudnya ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Beliau menegaskan bahwa di Indonesia kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang penting, hal ini terbukti dengan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi berperan membangun ekonomi negara pada masa krisis ekonomi 1997 dan 1998. Tetapi sekarang situasinya berbeda, ada banyak koperasi yang sudah tidak lagi aktif.

Perekonomian Indonesia telah mengalami tiga kali kelesuan ekonomi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ketika situasi ekonomi

⁵Sukmadinata SN, *Pengembangan Kurikulum pengembangan dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). h. 32.

⁶Deirde Wilson, *Teori Relevansi, Komunikasi dan Kognisi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 678.

⁸Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), h.66.

memburuk, para ekonom dan pengamat terutama pejabat pemerintah berupaya menjadikan usaha kecil sebagai penyelamat perekonomian nasional.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti menetapkan batasan masalah pada pemikiran Muhammad Hatta mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti, dan agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang Ekonomi Kerakyatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Mohammad Hatta ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini?

⁹Akhmad Suyono ”*Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya*”
Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, Vol .9 No 2, 2021

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Mohammad Hatta ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam memahami Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Indonesia selain itu penelitian ini memberikan sumbangsi pengetahuan dan pemikiran dalam khasanah ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membumikan ekonomi kerakyatan.
- b. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pemahaman mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan dan membumikan Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta. Selain itu penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai Ekonomi Kerakyatan.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1	Hamdan (2018),	Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi”	kualitatif	Hasil Penelitian adalah kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis, dimana terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara fundamental. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang yang mengalami terobosan semua disiplin ilmu, diantaranya dibidang artificiall intelligent, teknologi yang berbasis internet berdampak terhadap kehidupan manusia.
2	Aan Nur Hasim	Pemikiran Mohammad Hatta	kualitatif	Hasil pembahasan

	Ashari (2020),	Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Manan	mengenai pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta perspektif ekonomi islam Mohammad Abdul Manan, maka dapat disimpulkan bahwa, adapun pandangan Mohammad Hatta tentang Ekonomi Islam ialah menurut Mohammad Hatta sebagai inti dari Ekonomi islam yang dijadikan peletak dasar pemikirannya ialah keadilan-keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum, Negara tidak boleh membedakan antara orang-seorang dengan lainnya,
--	----------------	--	---

				Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
3	Siti Muallimah (2018),	Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah	Kualitatif	Menurut Bung Hatta Ekonomi Rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang di maksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi di usulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman colonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945.

4	Wahidin Said (2019),	Studi Komparatif Pemikiran Pemikiran Mohammad Hatta dengan Mahmoed Syaltut tentang koperasi atau Syirkah Ta'awunyah	Kualitatif	Dijelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran antara keduanya. Mohammad Hatta merupakan tokoh nasionalis yang pemikirannya lebih dekat pada koperasi secara umum. Sedangkan Mahmoed Syaltut lebih pada perspektif syariah atau hukum islam yang dikenal dengan nama syirkah ta'awunyah.
---	----------------------	---	------------	--

Persamaan dan perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian Hamdan (2018) dari penelitian ini terletak pada sampelnya yang dimana pada penelitian Hamdan memakai pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
- b. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian Aan Nur Hasim Ashari (2020) dari penelitian ini terletak pada sampelnya yang dimana pada Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Manan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Ekonomi

Kerakyatan Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

- c. Perbedaan yang dilakukan penelitian Siti Mualimah (2018) dan penelitian ini, terletak pada sampelnya yang dimana pada Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
- d. Perbedaan yang dilakukan penelitian Wahidin Said (2019) dan penelitian ini, terletak pada substansi skripsi, jika skripsi saudara Wahidin Said ini hanya terfokus pada konsep koperasinya Mohammad Hatta dengan segala akad yang ada didalamnya sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisikan agar masalah yang akan diteliti lebih fokus pada suatu titik permasalahan. Batasan istilah berisi memuat isi yang dipertegas makna yang dimaksud peneliti. Tujuan peneliti dan kegunaan penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang berisi tentang

penjelasan jenis penelitian. Unit analisis atau subjek penelitian berisi tentang hal-hal yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik keabsahan data berisi pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dan terakhir Sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang biografi tokoh disini dibahas profil dan pendidikan Mohammad Hatta, serta pemikiran-pemikiran dan karya-karya dari Mohammad Hatta.

Bab ketiga, membahas tentang paparan data penelitian yang berisi landasan teori ekonomi kerakyatan. menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun menurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten, antara lain pertanian tradisional, seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya, kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan kegiatannya berbasis masyarakat, kegiatan ekonomi yang berkembang untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Bab keempat, pembahasan dan hasil peneliti yang terdiri dari gambaran umum, lokasi penelitian yaitu letak geografis dan karakteristik masyarakat. Deskripsi data penelitian yaitu kesan masyarakat terhadap Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan, yakni ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat.

Pemikiran, Pemikiran berasal dari kata pikir, kata pikir dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan akal budi, ingatan, angan-angan, sedangkan jika kata pikir mendapatkan imbuhan kata Pe dan berakhiran-an menjadi pemikiran maka bermakna hasil berpikir (memikirkan).

Relevansi, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya hubungan dan kaitan. Dalam dunia pendidikan, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antar komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi dan evaluasi. Relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Perspektif, dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu, yang pertama, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) dan yang kedua, sudut pandang atau pandangan.¹¹

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 355.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 678

Ekonomi Syariah, adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok nash dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹²

Ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989, adalah ekonomi tradisional yang menjadikan basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun-menurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten, antara lain pertanian tradisional, seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan dan lainnya. Kegiatan disekitarnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.¹³

Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan kegiatannya berbasis masyarakat, kegiatan ekonomi yang berkembang untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Ekonomi kerakyatan menurut Baswir, bahwa ekonomi kerakyatan secara mikro diterjemahkan dengan melembagakan ekonomi rakyat dan mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, anataralain ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional serta diikutsertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan pangan usaha koperasi. Pelembagaan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran rakyat

¹²Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), h.66

¹³Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. H. 86

hanya dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan sistem perekonomian kerakyatan secara utuh.¹⁴ Kemudian, Baswir menegaskan dalam ekonomi kerakyatan diperlukan partisipasi anggota masyarakat untuk memiliki alat alat produksi atau modal nasional, baik modal material, intelektual maupun institusional. Implikasinya negara harus memastikan mampu mendistribusikan secara merata tiga modal tersebut kepada masyarakat, untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, sebab hal ini sesuai dengan pasal 27 UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak”.¹⁵

Benhard Limbong dalam bukunya menyatakan, ekonomi kerakyatan adalah salah satu cabang dari ekonomi yang berbasis pada potensi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan lain-lain, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.¹⁶

Hal yang menjadi pokok ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat. Karena sifatnya yang merata, persebaran modal yang baik, sistem ekonomi yang benar-benar

¹⁴Bawwir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, h. 40-41

¹⁵Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, h. 87-88

¹⁶Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, h. 89

bergerak dalam sektor riil, ekonomi rakyat mempunyai dampak pemerataan terhadap pendapatan yang baik dan mampu menggerakkan sektor riil secara efektif. Dalam dunia usaha, ekonomi rakyat adalah usaha-usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh rakyat.¹⁷

Definisi “Kerakyatan” sebagaimana yang dikemukakan Bung Hatta, ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Artinya Ekonomi Kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari Ekonomi demokrasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat.¹⁸

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh, peneliti menyimpulkan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah Ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan potensi yang dapat dimanfaatkan didalam masyarakat itu sendiri yang mana kegiatan memanfaatkan potensi ini akan memberikan dampak meningkatnya ekonomi dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat disekitarnya.

Ekonomi kerakyatan dalam kaitannya perubahan jaman, maka ekonomi kerakyatan tidak hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia semata tetapi juga memanfaatkan potensi dari dampak kemajuan teknologi.

B. Substanti Ekonomi Kerakyatan

Substansi ekonomi kerakyatan dalam 33 UUD 1945 secara umum mencakup 3 hal, yaitu:¹⁹

¹⁷ Sofyan Rizal, Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, diakses pada 20 juli 2023 pada pukul 17.17 WIB.

¹⁸Bawsir, *Manifesto Ekonomi Kerakatan*, h. 11.

¹⁹Benhard Limbong, *Ekonomi Kerkyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, h. 80-82

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional, ini berarti partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting menjamin efektivitas daya guna dari seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional, artinya dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus adajaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir-miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan kata lain negara wajib menyelenggarakan system jaminan sosial bagi fakir-miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota anggota masyarakat. Artinya, dalam ekonomi kerakyatan anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional

dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan harus tetap berada dibawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Substansi ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam pengelolaan modal atau faktor-faktor produksi nasional lainnya. Modal tidak hanya terbatas pada modal material, tetapi mencakup pula modal intelektual dan modal institusional.

C. Prinsip dan Nilai Ekonomi Kerakyatan

Prinsip ekonomi sejatinya bersifat universal, dalam artian berlaku dimana saja, termasuk dalam bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ekonomi kerakyatan dibawah payung ekonomi pancasila. Kesimpulan dari ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sila kelima. Pancasila menjadidasar utama yang menjadi prinsip ekonomi kerakyatan.²⁰

Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial. Adapun nilai-nilai dasarnya sebagai berikut:²¹

- 1) Ketuhanan, dimana roda kegiatan ekonomi bangsa di gerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral”.

²⁰Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, (Yogyakarta: UST-Press, 2015). h. 106.

²¹Mubyarto dalam Benhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, h. 89-90.

- 2) Kemanusiaan, yaitu pemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
- 3) Kepentingan nasional (nasionalisme ekonomi), dimana dalam eraglobalisasi yang makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan *populeryang* dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara sedang berkembang *developing country* seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu/pelopop negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.²²

D. Koperasi dan UMKM Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan

1. Koperasi

Organisasi Buruh Internasional mendefenisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan individu yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara

²²Natalia Artha Malau, *Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Research Sains, VoL.2 No.1 Januari 2016. H. 7-8. Diakses pada 05 Januari 2023 pada Pukul 11.31 WIB

demokratis, dengan memberi kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung resiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha dan dimana para anggota harus berperan serta secara aktif.

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosialmasyarakat Indonesia, terutama dengan menonjolkan sikap tolong menolong dan kepedulian antar sesama yang tinggi. Secara sederhana Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu.²³

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU Nomor 9 Tahun 1995, mendefenisikan Usaha Kecil sebagai berikut:

- a) Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk Koperasi.
- b) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.

²³Mohammad Hatta dalam M Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017). h. 68.

- c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000.00,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000.00,- per tahun.

Inpress Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan usahamenengah mendefinisikan usaha menengah sebagai usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi; berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha besar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200 juta sampai dengan Rp10 miliar,tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun.²⁴

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1 tentang usaha mikro,kecil dan menengah, maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah yaituusaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

²⁴M Azrul Tanjung.Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia.

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan tujuan UMKM terdapat di Pasal 3, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Perlunya penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).²⁵

E. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta dalam *Daulat Rakyat* (1931) menulis artikel berjudul *Ekonomi Rakyat dalam Bahaya*, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan”.

²⁵Adnan Husada Putra, *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.*, Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 2016, 5(2): 40-52. Diakses pada 05 Januari 2023 pada pukul 11.56 WIB.

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis atau bisa disebut Demokrasi Ekonomi. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.²⁶

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orangseorang.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²⁷

²⁶ Bernhard Limbong, *Ekonomi kerakyatan dan Nasionalisme*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm.26

²⁷ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato Jilid III*, (Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2002), hlm. 36

Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.²⁸

Menurut Sarbini Sumawinata dalam bukunya Politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara ,sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.²⁹

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelakuusaha masyarakat.³⁰

²⁸Fifi Hasmawati, ”*Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol.V, No.5, (Tahun 2018):55

²⁹ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 161

³⁰ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Media Indonesia, 2001), hlm.67

F. Pengertian Relevansi

Relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.³¹

Relevansi pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik atau masyarakat setempat. Diharapkan sistem pendidikan yang dijalankan suatu lembaga pendidikan dapat memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk dapat bergaul dengan lingkungannya. Kedua, relevansi pendidikan kaitannya dengan tuntutan pekerjaan. Lembaga pendidikan bertugas menyiapkan lulusan yang mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pihak lembaga pendidikan hendaknya melakukan kerjasama dengan masyarakat atau pemakai lulusan tersebut. Ketiga, relevansi pendidikan kaitannya dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Sistem pendidikan disamping untuk menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan kehidupan masa kini, juga harus dibekali dengan berbagai pengetahuan atau hal-hal lain untuk menghadapi kemungkinan perubahan tuntutan kehidupan akibat perkembangan jaman pada masa yang akan datang.

³¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

G. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya.

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Tuhan. Menurut Monzer Kahf, pengertian ekonomi syariah adalah bagian dari ilmuekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Menurut M.A Mannan, pengertian ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

H. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek), yaitu oikonomia. Kata oikonomia berasal dari kota oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok yang diperintah oleh suatu negara. Dari pengertian etimologis tersebut ilmuekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.

Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *mu'amalah maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan hubungan manusia mengenai kebutuhan

hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*, yaitu mengatur soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Adapun menurut Dr. Yusuf Qardhawi ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan untuk Tuhan. Sedang ekonomi adalah sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai fahlah di dunia dan akherat (hereafter). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari ekonomi islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan denganya atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridha Allah. Dari definisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi islam, yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dari ridha Allah yang kesemuanya diilhami oleh nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah, yang akhirnya menunjukkan konsistensi antara niat karena Allah, kaifat atau cara-cara ghayah dan tujuan dari setiap manusia. Ini tidak berarti ekonomi islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang yang beragama islam, karena islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi islam

lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan dibangun daripada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang beragama islam. Hanya saja, tentu islam menghendaki agar umat islam itu sendiri justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi islam itu sendiri yang dimilikinya.

I. Pengertian Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. Teori merupakan cara, strategi atau konsep yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/praktek. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos*, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT. dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW. sebagai Rasul-Nya. Satu-satunya agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah, harta yang ada pada manusia hakekatnya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan

umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. untuk dipertanggungjawabkan.³²

Menurut M. Abdul Mannan Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.³³

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminologi adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmuekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

1. Tujuan Teori Ekonomi Islam

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.³⁴

Menurut Zainudin Ali, tujuan ekonomi Islam bisa didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu: (a) konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan dan pendapatan

³² Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia,2015), Hlm. 5

³³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19

³⁴ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia,2015), Hlm. 7

dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.³⁵

2. Prinsip-Prinsip Teori Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu³⁶:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipandari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Teori ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentu di akhirat nanti
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk

3. Manfaat Teori Ekonomi Islam

Banyak manfaat yang didapatkan dari teori ekonomi Islam ini, diantaranya adalah: (a) dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Islam secara sempurna,

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1,2008), Hal. 4

³⁶ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia,2015), Hlm. 9

secara kaffah tidak parsial; (b) terhindar dari bahaya riba, eksploitasi dan maisir; (c) mendapatkan rizki yang halal dan toyib; (d) dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi (membayar upah buruh sebelum keringatnya mengering); (e) dapat melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh; (f) dapat melaksanakan uswahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek ekonomi, berikut para sahabatnya; (g) dapat membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi umum; (h) memperoleh ketenangan lahir dan batin; (i) menegakan amar ma'ruf nahi munkar; (j) dapat membangun pikiran, gagasan, ide-ide untuk kemajuan ekonomi islam ke depan; (k) dapat mencetak generasi ekonom yang islami; (l) memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhriat kelak.³⁷

4. Ruang Lingkup Teori Ekonomi Islam

Ruang lingkup teori ekonomi Islam, dilihat dari segi pengamalannya tidak terlepas dari tiga disiplin ilmu, yaitu: Ilmu Tauhid, Mu'amalah/Ekonomi Islam dan Ibadah. Ilmu Tauhid membahas tentang keimanan kepada Allah SWT. yang terinci kepada rukun iman yang enam, yaitu: (1). Iman kepada Allah SWT. (2). Iman kepada Malaikat Allah SWT. (3). Iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. (4). Iman kepada para Nabidan Rasul. (5). Iman kepada Hari Kiamat. (6). Iman kepada Qodloda dan Qodar. Berdasarkan keimanan kepada Allah SWT. bagi umat yang akan bermu'amalah tentu akan merasa takut bila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. Seperti seorang pedagang ia takut akan hari kiamat atau hari pembalasan apabila curang terhadap timbangan dari akad jual beli. Dalam

³⁷ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia, 2015), Hlm. 20

batinnya mempunyai nilai-nilai ilahiyah untuk tidak memalingkan segala bentuk kecurangan dan selalu mempunyai rasa takut apabila melanggarnya.³⁸

5. Teori dalam Ekonomi Islam

a. Teori Permintaan dalam Islam

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib.

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga, apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya, dengan asumsi *ceteris paribus*. Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka optimal solutionnya adalah corner solution, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal terjadi di kurva indifferen dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Apabila Y adalah barang haram dan X adalah barang halal, maka optimal

³⁸ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia, 2015), Hlm. 28

solutionnya adalah pada titik dimana konsumsi barang haram berada di titik O.³⁹

b. Teori Penawaran dalam Islam

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaankonvensionaldengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel ataufaktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatuperbedaan dalam pespektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilaiIslam.

Pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum,apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkaitdengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (zuhud) dan ekonomis (iqtishad). Inilahnilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup Islamic man. Keduaadalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusiyaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusiaitu pada hakekatnya adalah barang-narang atau transaksi-transaksi yangberbahayabagi dirinya dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh

³⁹ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia,2015), Hlm. 63

kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu.⁴⁰

Dengan kedua batasan ini maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan (filtering) yang membuat wilayah penawaran (domain) dalam ekonomi Islam menyempit yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam.

6. Teori Produksi dalam Islam

Kegiatan produksi dalam Islam adalah tidak semata mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan dunia saja akan tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk mencapai maksimalisasi keuntungan diakhirat. Berbeda dengan teori produksi ekonomi umum/konvensional yang hanya memaksimalkan keuntungan dan kepuasan dunia saja. Teori produksi dalam Islam adalah teori produksi menurut Al- Quran dan Hadist, dan ini sangat erat sekali hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kumpulan dasar- dasar ekonomi yang di simpulkan dari Al- Quran dan Hadist. Teori produksi dalam Islam juga adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep mashlahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang

⁴⁰ http://dime12002.multiply.com/journal/12/Teori_Penawaran_Islami. Diakses tanggal 5 September 2023.

produsen biasanya adalah laba (profit), yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan.⁴¹

Teori produksi dalam Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi Islam, teori kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun benda demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memerhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi.⁴²

7. Teori Distribusi Pendapatan dalam Islam

Dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah

⁴¹ Dr. Itang, M.Ag, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta : Laksita Indonesia, 2015), Hlm. 95

⁴² Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Labore : Islamic Publication, 1990.

yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perelengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir.

Ekonomi Islam menolak butir kedua dari empat unsur (upah, sewa, bunga, keuntungan), yaitu unsur bunga. ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya. memperlihatkannya juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai

manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.⁴³

J. Perekonomian Indonesia dalam Islam

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.⁴⁴

Ketika membahas tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia maka akan dijumpai tiga wacana yakni, demokrasi ekonomi (ekonomi Kerakyatan), ekonomi pancasila dan ekonomi Islam.

Dalam ekonomi kerakyatan secara sederhana memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip Kekeluargaan atau Kerjasama

Dalam Firman Allah Qs. Al-Maidah:2

⁴³<http://dedysupriatman.blogspot.com/2012/05/distribus-pendapatan-dalam-islam.html>.

Diakses tanggal 5 September 2023

⁴⁴ A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Press, 2002). h.2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Diri arti ayat diatas kita diharuskan untuk saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan taqwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.⁴⁵

Menurut Hatta masalah kebersamaan dan kekeluargaan syarat dalam ajaran Islam, Manusia tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha adil, seseorang wajib mengabdikan hidup dan perjuangannya bagi persaudaraan dan keadilan di antara umat manusia.⁴⁶

⁴⁵ Syukron Affani, *Tafsir Alqur'an dalam sejarah perkembangannya*

⁴⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Multi Pressindo, 2008). h. 188.

2. Prinsip Keadilan

Ciri utama ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip-prinsip keadilan demokrasi ekonomi dan kepedulian terhadap yang lemah. Keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah penting dalam rangka pengentasan kemiskinan. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Keadilan dalam perekonomian berarti bahwa mencegah seseorang untuk berbuat dzalim terhadap yang lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ تَعَدَّلُوا أِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang, yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maksudnya dari ayat tersebut kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT bukan karena manusia. Dan tegakkanlah kebenaran dan keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dalam rangka mencari ridho Allah SWT. Keadilan adalah neraca kebenaran. Ketika terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun penyebabnya, maka hilanglah kepercayaan dan tersebarlah kerusakan.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengandemikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secarabersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomiberdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yangsempurna. Kaitan antara kegiatanekonomi dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dalam pandangan ajaran Islam.⁴⁷

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 15-19

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasidan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Jl.HT. Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2022 sampai September 2023.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, yang mana digunakan untuk meneliti objek yang ilmiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.⁴⁸

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ekonomi normatif. Bila mana terdapat data-data empiris maka hal ini dimaksudkan agar mempertajam analisa dan menguatkan argument penelitian.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang bertujuan mengidentifikasi esensi yang terkait dengan suatu fenomena yang digambarkan, yang mana melibatkan studi tentang sejumlah kecil subyek melalui keterlibatan yang panjang dan ekstensif untuk mengembangkan pola makna.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 347.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan, jurnal nasional maupun internasional, dengan deskripsi jenis sumber data adalah data primer dan data sekunder adalah berbagai literatur yang tersedia terkait dengan ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya di Indonesia. Data primer adalah buku-buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta dan data sekunder adalah berbagai literatur yang tersedia yang terkait dengan ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya di Indonesia.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan pokok-pokok persoalan dan terstruktur sedemikian rupa, yang selanjutnya dengan keyakinan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang objek permasalahan seperti yang tertera pada rumusan masalah.⁴⁹

Subjek dari penelitian ini diambil melalui beragam informasi kepustakaan (Buku, Ensiklopedia, Jurnal Ilmiah, Koran, Majalah, dan Dokumen lainnya) yang didapat pada Perpustakaan Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal 3.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, literatur, media cetak dan atau semua bahan tertulis lainnya, termasuk karya ilmiah yang diakses dari internet. Data deskriptif mengenai Mohammad Hatta yang didapatkan dari berbagai literatur akan disusun ulang hingga dapat menyatu dengan teks-teks atau pembahasan skripsi.

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa transkrip, catatan, buku, surat berharga, majalah dan sebagainya. Untuk dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Mohammad Hatta, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis peneliti.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperiksa. penelitian ini

menggunakan tiga teknik untuk menjamin keabsahan data berdasarkan pendapat Sugiyono, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber, data tidak bisa dirata-rata kan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data.⁵⁰

2. Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan Menggunakan bahan referensi adalah penguat untuk membuktikan yang telah ditemukan peneliti. Dalam penelitian ini alat bantu yang peneliti gunakan adalah alat komunikasi seperti handphone dan buku untuk berkomunikasi mengetahui informasi yang lebih banyak.⁵¹

3. Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Sebagai

⁵⁰ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 241

⁵¹ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 275

bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian atau dokumentasi.⁵²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apabila yang dapat diceritakan orang lain. Kemudian penulis mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksana teori dan praktek lapangan.⁵³

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di presentasikan. Dengan demikian dalam analisis data kualitatif pengelolaan datanya tidak menggunakan teknik statistik sehingga hasil analisis jawaban responden terdapat pernyataan yang di ajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data-data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir induktif.⁵⁴

⁵² Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 273

⁵³ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 243

⁵⁴ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 245

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Tokoh

1. Profil Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bukittinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak ditengah-tengah dataran tinggi Agam. Letaknya indah diujung kaki gunung Merapi dan Gunung Singgalang dan disebelah utaranya kelihatan pula melingkung cabang-cabang Bukit Barisan. Antara Bukittinggi dan gunung Singgalang terbentang sebuah ngarai yang dalam dan bagus pemandangannya. Agak jauh dari tempat itu pada jurusan sebelah timur tampak gunung Sago. Apabila tidak ada kabut, kelihatan dari jauh sebelah barat laut gunung pasaman yang kesohor dalam gunung yang mengandung emas. Nagarai dan gunung-gunung serta bukit-bukit barisan yang kelihatan disekitarnya itu memberikan kepada kota Bukittinggi suatu pemandangan yang indah sekali. Hawanya sejuk, pada malam hari malah terasa dingin. Berbagai jenis bunga subur tumbuhnya disana. Orang-orang yang datang bertamasya dari daerah pesisir sering menamai Bukittinggi "Kota kebun bunga mawar".⁵⁵

Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Ia berasal dari Batu Hampar, kira-kira 16 km dari Bukittinggi arah ke Payakumbuh. Ibunya bernama Saleha, dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara

⁵⁵ Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta : PT Tintamas Indonesia, 1979), h. 1

perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.⁵⁶ Orang tua Mohammad Hatta mula-mula memberikan nama Mohammad Athar kepadanya. Athar sendiri artinya "harum". Namun, karena orang-orang tua dan di lingkungannya sulit menyebutkan nama Athar, maka sehari-hari, ia dipanggil "Atta" yang kemudian berkembang menjadi sebuah nama baru, "Hatta".⁵⁷

Di masa kecil, Hatta berkembang seperti anak-anak biasa, tetapi ia kurang memiliki sahabat bermain karena para tetangga sekitarnya tidak mempunyai anak seusianya dan di keluarganya, Hatta merupakan satu-satunya anak laki-laki. Kadang-kadang familinya menemukan Hatta bermain sendiri dengan cara membuat miniatur lapangan bola, sedangkan pemain-pemainnya dibuat dari gabus yang dibebani timah. bola, dibuatnya dari manik bundar. Hatta memainkan sendiri permainan sepak bola itu dengan asyiknya. Selain itu, Hatta adalah sorang yang hemat. Setiap kali jika orang tuanya memberi uang belanja kepadanya, yang pada waktu itu sebenggol, selaluuang itu ditabungnya. Caranya, uang logam itu disusun sepuluh-sepuluh dan disimpan dimejanya. Jadi, setiap orang yang mengambil atau mengusiknya, Hatta selalu tahu. Namun, kalau orang meminta dengan baik dan Hatta menganggap perlu diberi, tak segan-segan ia akan memberi apa yang dimilikinya.⁵⁸

Sebagai seorang muslim, sejak kecil Hatta rajin sembahyang. Mula-mula dia belajar dari lingkungan keluarga, dan setelah remaja, dia mulai belajar di

⁵⁶http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta diakses pada tanggal 03 Agustus 2023

⁵⁷ Meutia Farida Swasono (penyunting), *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, (Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, 1980), h. 5

⁵⁸ Meutia Farida Swasono (penyunting), *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, (Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, 1980), h. 5

Surau dengan guru ngaji. Di zaman masa kemerdekaan, setiap kali berada ditahan, Hatta tidak pernah melupakan sembahyang, puasa pun selalu dia jalankan. Dan satu lagi merupakan kebiasaan yang unik dari Hatta adalah bahwa di sekitarnya selalu terdapat buku. Buku, sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap lembar kertas dari bukunya, dibukanya secara hati-hati dan dibacanya secara cermat. Disamping membaca, Hatta rajin pula mengarang dan menulis buku. Setiap orang yang meminjam bukunya, selalu dicatat dalam buku: nama, tanggal meminjam, tanggal mengembalikannya serta orang tersebut selalu diingatkannya agar menjaga buku yang dipinjamnya dengan sebaik-baiknya.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Hatta, seorang proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di rumah sakit Dr.Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.⁵⁹

2. Riwayat Pendidikan Mohammad Hatta

Dalam hal bersekolah, Hatta menempuhnya berlainan dari niat yang dikandung keluarga ayahnya di Batu Hampar. Keluarga ayahnya ini menginginkan sekali agar Hatta melanjutkan pelajaran agama bila telah menyelesaikan Sekolah Rakyat 5 tahun, maksud mulanya ke Mekkah, kemudian ke Mesir. Untuk keperluan ini persiapan pun dilakukan, tetapi setelah dua tahun

⁵⁹ Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta : PT Tintamas Indonesia, 1979), h. 3

belajar di Sekolah Rakyat Bukittinggi, Hatta pindah ke Sekolah Belanda ELS (Europeesche Lagere School-Sekolah Dasar untuk orang-orang kulit putih) di kota itu juga, kemudian ke ELS Padang (Mulai kelas 5 sampai kelas 7). Kepindahan ke Padang ini, yang terjadi tahun 1913, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga Ibu agar Hatta memperoleh pelajaran bahasa Prancis (disamping bahasa Belanda) yang mulai diajarkan di kelas 5. Ketika di Bukittinggi Hatta telah mulai belajar bahasa Inggris secara privat, yang terpaksa berhenti karena gurunya pindah ke Jakarta. Ia mulai belajar bahasa Prancis tetapi masih juga bersifat privat, sedangkan di sekolah yang di Padang pelajaran itu diberikan dalam rangka kurikulum. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1917. Pada awalnya, Hatta berniat meneruskan studinya ke HBS (*Hogere Burger School*-Sekolah Menengah Belanda 5 tahun), dan ia memang telah lulus ujian masuk disini. Tetapi untuk memasuki sekolah tersebut, berarti Hatta harus pindah ke Jakarta, dan terhadap hal ini ibunya keberatan karena Hatta memang baru berumur 14-15 tahun ketika itu. Oleh sebab itu, ia beralih ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*-Setingkat Sekolah Menengah Pertama) yang ia tamatkan pada tahun 1919. Ada juga godaan pada Hatta untuk bekerja selesai ELS di Padang, malah ia diterima untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji f65 sebulan, tetapi niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya.⁶⁰

Baik di Bukittinggi maupun ketika bersekolah di Padang. Hatta disamping bersekolah pagi hari, juga mengaji. Ia beruntung mendapatkan di kedua kota itu guru-guru yang berpandangan luas dan maju dalam pelajaran agama Islam,

⁶⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21

masing-masing Haji Muhammad Djamil Djambek (1860-1933). Dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933). Pengkajian yang agak intensif mengenai agama Islam dilakukannya selama di di Bukittinggi dengan Syaikh Djambek dimana ia telah mulai mempelajari Bahasa Arab (*nahwu dan sharaf*) agar mudah mempelajari fiqih dan tafsir. Sayang ketika sudah pindah ke Padang, pelajaran seperti ini tidak dilanjutkannya. Baru setelah belajar di MULO ia bisa menerima lagi pelajaran keislaman secara lebih teratur dibawah asuhan Haji Abdullah Ahmad.⁶¹

Pada tahun 1919 Hatta pergi ke Jakarta (yang dulu bernama Batavia) untuk besekolah di PHS (*Prins Hendrik Handels School*-Sekolah Dagang Prins Hendrik). Studinya di PHS itu sendiri ia selesaikan dengan tertib, umumnya juga tanpa kesulitan. Hatta merasakan pengembangan pemikirannya dengan cara-cara para guru di PHS memberikan pelajarannya yang lebih mengutamakan pengembangan dan bukan hafalan. Dan pada tahun 1921 ia menyelesaikan studinya di PHS dengan menempati urutan (rangking) ketiga. Pada saat itulah ia kembali cenderung terpengaruh oleh godaan untuk bekerja dengan gaji permulaan f350. Guru-gurunya di PHS pun, kecuali seorang, menganjurkan agar ia segera saja mempraktikkan pengetahuan yang diperolehnya di sekolah.⁶²

Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya juga ke negeri Belanda. Walaupun pamannya Ayub Rais yang menjanjikan bantuan padanya telah jatuh pailit, ia akan berusaha dengan bekal yang ada, dan ia juga mengharapkan

⁶¹Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21

⁶²Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 31

bantuan berupa beasiswa dari pihak Belanda. Kalangan pedagang di Padang yang bergabung dalam Serikat Usaha turut juga membantunya. Dan akhirnya pada tahun 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland *Handelshoge school* (bahasa Inggris :*Rotterdam School of Commerce*, kini menjadi *Erasmus Universiteit*). Dan di negeri ini, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.⁶³

Pada tahun 1923, Hatta lulus dalam ujian *Handels-ekonomie*. Mula-mula Hatta bermaksud akan menempuh ujian doktoral ilmuekonomi pada akhir tahun 1925, akan tetapi pada tahun 1925 di Rotterdam diadakan cabang baru dalam pelajaran doktoral, yaitu “*Staatskunding-economische richting*” dimana Hukum Negara dan Hukum Administratif menjadi konsentrasi utama disamping ekonomi, maka Hatta pun tertarik untuk memasuki jurusan baru tersebut. Menurut pendapatnya, ia tidak akan rugi kalau menyambung lagi pelajarannya yang hampir tamat itu ke jurusan yang baru. Dengan memperpanjang studi satu atau satu setengah tahun lagi, ia akan memperoleh perlengkapan yang lebih sempurna untuk menjalankan kewajibannya terhadap tanah air di masa datang, dan ia merencanakan akan menempuh ujian doktoralnya pada akhir tahun 1926 atau awal tahun 1927.⁶⁴ Akan tetapi, karena kesibukannya sangat padat, Hatta baru menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 1932.⁶⁵

⁶³http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta diakses pada tanggal 05 Agustus 2023

⁶⁴ Mohammad Hatta, *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*, (Jakarta : PT Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971), h. 24

⁶⁵ Mohammad Hatta, *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*, (Jakarta : PT Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971), h. 27

3. Sejarah Sosial Mohammad Hatta

Hidup Mohammad Hatta pada waktu mudanya hampir sejalan dengan timbulnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Keadaan inilah yang menjadi dorongan bagi dirinya dalam usia yang sangat muda, yaitu saat duduk dibangku sekolah menengah (MULO), telah tertarik ke dalam pergerakan. Pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Budi Utomo dalam tahun 1908, dan berkobar sejak tahun 1913, membuka hati Pemuda Indonesia untuk menyadari kewajiban mereka terhadap Tanah Air. Berturut-turut dari tahun 1916 lahirlah perkumpulan-perkumpulan pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa dan Jong Ambon. Dengan sendirinya Mohammad Hatta yang berjiwa pengabdian dibawa kepada perkumpulan Jong Sumatranen Bond (JSB).

Dalam organisasi JSB ini mula-mula Hatta menjadi bendahara. Sebagai bendahara, Hatta menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan, sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya bisa berjalan lancar kalau anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin inilah selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Hatta.⁶⁶ Kemudian setahun berikutnya Hatta diangkat menjadi sekretaris sekaligus merangkap bendahara cabang Padang. Ini berarti bahwa Hatta telah berhasil menempatkan dirinya di antara kawan-kawan sebagai orang yang bisa dipercaya baik dalam memegang urusan keuangan, maupun memutar roda organisasi.⁶⁷

⁶⁶<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

⁶⁷ Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21.

Sebagai pengurus Jong Sumatranen Bond cabang Padang. Hatta mulai mempertajam pengetahuannya mengenai perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya membacaberbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hattamulai mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar “Utusan Hindia”, dan AgusSalim dalam “Neratja”. Kesadaran politik pun Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokohpolitik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis (Tokoh Sarekat Islam).⁶⁸

Kemudian pada saat ituusia Hatta menginjak 17 tahun, ia pun turut aktif dipengurusan pusat Jong Sumatranen Bond (JSB) pada saat itu bersekolah di Jakarta. Dalamperkumpulan JSB ini ia terpilih menjadi bendahara pada perkumpulan tersebut. Hatta punbersedia menjadi bendahara itu tapi hanya untuk jangka waktu satu tahun, karena dalamtahun 1921 ia akan menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Tetapi walaupun hanya setahun, iaberhasil menertibkan administrasi, terutama keuangan perkumpulan.⁶⁹

Lalu pada tahun 1921, pada saat Hatta berkuliah di Belanda, ia mulai menerjunkandirinya ke dalam *Indische Veriniging* (Perhimpunan Hindia), sebelumnya, *Indische Veriniging* yang berdiri pada tahun 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar tanah air.Atmosfer pergerakan mulai mewarnai *Indische Veriniging* semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo) diBelanda pada 1913

⁶⁸<http://www.grelovejogja.wordpress.com/2006/12/09/mohammad-hatta/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

⁶⁹Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 25.

sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran DeExpres. Kondisi itu tercipta tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh *indische Veriniging* mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Makmurlah Tanah Hindia! Kekallah Anak Rakyatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.⁷⁰

Kemudian pada tanggal 17 Januari 1926, Hatta secara resmi terpilih menjadi ketua PI. Dan jabatan ketua tersebut diterimanya dengan mengucapkan pidato “*Economischewereldbouw en Machtstegenstellingen*-Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan”, yang mengupas secara ilmiah apa sebab-sebab pertentangan si penjajah berkulit putih dan yang terjajah yang berkulit berwarna, bagi kulit berwarna apabila ia benar-benar mau merdeka, harus menjalankan politik non kooperasi. Pertentangan kulit putih dan kulit berwarna akan bertambah hebat, (yang waktu itu pada tahun 1926) sudah tampak tanda-tanda yang menjurus kesana. Pada akhir pidato Hatta juga mengucapkan bahwa meruntuhkan penjajahan kulit putih atas kulit berwarna adalah tugas peradaban. Dan pertentangan itu akan berakhir kelak dalam suatu perang Pasifik dimana kulit berwarna akan memperoleh kemenangan, kemudian barulah penjajahan akan berakhir. Waktu mengucapkan pidato itu, Hatta mungkin tidak

⁷⁰ Mavis Rose, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 17.

akan menduga bahwa perang Pasifik itu terjadi setelah pidatonya itu dan membawa kemerdekaan empat tahun sesudah itu.

Aktivitas dan sepak terjangnya yang bisa dibilang fenomenal, tak pernah membuat resah pihak Belanda. Akhirnya bersama Nazir St. Pamontjak, Ali Sastromidjojo dan AbdulMadjid Djojoadingrat. Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul "Indonesia Merdeka".

4. Aktivitas Terkait Bidang Yang Dikaji

Secara pribadi Hatta tidak hanya seorang politikus tetapi lebih dari itu dia adalah seorang cendekiawan yang tulus, terutama di bidang ekonomi dan hukum Tata Negara. Hal itu tidaklah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan di bidang tersebut. Dalam bidang ekonomi, Hatta mengeluarkan gagasan mengenai penerapan demokrasi yang tidak hanya di bidang politik saja, seperti yang diterapkan oleh negara-negara Barat. tetapi juga meliputi demokrasi ekonomi, dimana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasai oleh orang perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini rakyat pun mempunyai hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dan pemikiran ekonomi Hatta lainnya, yang juga terbilang fenomenal adalah

membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil melalui jalan koperasi. Dalam mengeluarkan gagasan terlihat bahwa Hatta mengambil demokrasi ekonomi ini sebagai titik tolak dalam pemikiran-pemikiran ekonomi Hatta lainnya.

Adapun pemikiran Mohammad Hatta di bidang Ekonomi sangat menekankan moral dan akhlak. Penekanan moral dalam pemikiran ekonominya. Bahkan dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Selain itu pemikiran Mohammad Hatta tentang Koperasi yang sampai saat ini masih digunakan masyarakat.

Adapun pemikiran Hatta dalam bidang Hukum Tata Negara, Hatta menolak pandangan Profesor *van Vollenhoven*, yang mengatakan bahwa kata Indonesia tidak dapat dipergunakan sebagai penamaan ketatanegaraan bagi daerah yang dikuasai Belanda di Asia Tenggara. Menurut pendapatnya bahwa sekalipun bagian terbesar dari orang-orang Indonesia, yakni kurang lebih 49 juta jiwa, masih ada kira-kira 15 juta yang tinggal di luar wilayah itu. Dalam hal ini Hatta menyatakan keberatannya dengan pernyataan Profesor *van Vollenhoven* tersebut. Hatta berpendapat, sebaiknya Profesor *van Vollenhoven* melihat contoh ke Amerika Serikat. Kata “Amerika” yang secara geografis ialah benua “baru” yang membentang dari kutub ke kutub yang didalamnya terdapat berbagai negara dan bangsa, namun hanya satu negara yang menduduki kurang dari seperempat bagian dari seluruh wilayahnya. Lalu penamaan (negara) Amerika Serikat menimbulkan kesan adanya perserikatan dari semua negara

yang ada di Amerika, akan tetapi dalam hal ini tidak dapat dipakai, sebab dalam hal ini penamaan Amerika Serikat sudah lazim, dan kalau kita berbicara tentang Amerika Serikat, maka yang lazimnya dimaksud adalah penduduk “Amerika Serikat” dan bukan orang Kanada, Meksiko dan lain sebagainya.⁷¹

Namun walaupun begitu, semasa hidupnya, Hatta tidak membatasi pemikirannya hanya di dua bidang tersebut, sebagai politikus dan juga seorang muslim, Hatta kerap kali menelurkan gagasan-gagasannya dalam masalah politik dan juga pemikiran keislaman.

Dalam pemikirannya di bidang politik, Hatta secara tegas mengecam kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa kulit putih kepada kulit berwarna.⁷² Hatta melihat bahwa motivasi penjajahan yang dilakukan itu lebih didasarkan oleh ketamakan.⁷³ Hatta juga menolak anggapan bahwa kolonialisme adalah sebuah transfer peradaban dari bangsa yang lebih maju peradabannya ke bangsa yang terbelakang.

Pemikiran Hatta dalam bidang politik adalah keharusan politik non-kooperasi sebagai satu-satunya strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Karena kemerdekaan tidak akan diberikan oleh pihak penjajah kepada pihak yang terjajah, hal itu telah dibuktikan oleh pelanggaran janji yang telah dilakukan Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada November 1918. Selain itu, untuk menuju Indonesia merdeka, rakyat harus

⁷¹ Lihat Mohammad Hatta (Emil Salim, dkk. Penyunting), *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1 Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta : LP3ES, 1998), h. 17

⁷² Istilah kulit putih dan kulit berwarna merupakan ciri khas dari gaya tulisan Hatta

⁷³ Lihat Mohammad Hatta (Emil Salim, dkk. Penyunting), *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 3, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial*, (Jakarta, LP3ES, 2001), h. 337

diberikan kesadaran bersama akan kemerdekaannya, dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi rakyat. Dalam memberikan kesadaran ini ia berbeda dengan Soekarno yang lebih menekankan rapat-rapat akbar. Pemikiran Hatta di bidang politik yang lain adalah penerapan politik bebas aktif, dalam pidatonya kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNP) pada tanggal 2 September 1948, ia mengatakan :

“mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan Internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”⁷⁴

Pidato inilah yang dianggap merupakan peletakan dasar politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu politik bebas dan aktif, “bebas” karena Indonesia tidak ingin bersekutu dengan salah satu dari blok-blok yang bertentangan, blok Barat dan blok Komunis. “Aktif” maksudnya negara ini berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB.⁷⁵

Selain itu terdapat juga pemikiran mengenai keislaman Hatta, walaupun tidak banyak. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah, membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari, siapa yang memahami isi dan memaknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, disitu mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia

⁷⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan*. (Jakarta, UI Press, 1980), h. 30

⁷⁵ Lihat Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 3*, h. 469

harus berjuang diatas jalan Allah dan darimana ia mendapat kekuatan untuk berjuang.⁷⁶

Ibadah dan perbuatan orang Islam di atas dunia hendaklah sesuai dengan sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan yang maha kuasa, pengasih dan penyayang serta adil dan selalu berdiri diatas jalan yang benar. Penjelmaan daripada sifat pengasih dan penyayang ialah persaudaraan dari segala bangsa. Sebab persaudaraan segala bangsa itu hendaklah menjadi tujuan kita. Hanya diatas persaudaraan itulah bisa tercapai rukun damai dalam pergaulan internasional.⁷⁷

Persaudaraan hanya mungkin terjadi bila terdapat derajat yang sama. Antara tuan dan budak tidak mungkin tercapai persaudaraan yang sebenarnya. Untuk mencapai dasar bagi persaudaraan bangsa-bangsa sedunia, maka perlulah lenyaplah lebih dahulu stelsel, imperialisme dan penjajahan yang menimbulkan penindasan bangsa yang satu oleh bangsa yang lain, sehingga kemajuan kebudayaan dan perekonomian yang lain yang tertindas itu jadi terhalang.

5. Peran Sosial dan Akademik

Selama menjadi Wakil Presiden, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato radio

⁷⁶ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato III*, (Jakarta : Toko Buku Gunung Agung, 2002, hal 36.

⁷⁷ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato III*, (Jakarta : Toko Buku Gunung Agung, 2002, hal 36.

untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai bapak koperasi Indonesia pada kongres koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”.

Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”. Sesudah Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Hatta memperoleh beberapa gelar akademis dari berbagai Perguruan Tinggi antara lain, Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Hatta sebagai Guru Besar dalam ilmu politik perekonomian, Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang juga memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ekonomi, Universitas Indonesia juga memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum.⁷⁸

6. Karya yang Pernah dihasilkan Mohammad Hatta

Adapun semua pemikiran-pemikiran Hatta dituangkan dalam bentuk karya-karya tulis antara lain :

- a. Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan
- b. Beberapa Fasal Ekonomi Jilid I, Jalan Ekonomi dan Koperasi
- c. Beberapa Fasal Ekonomi Jilid II, Jalan Ekonomi dan Bank

⁷⁸<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

- d. Kumpulan Karangan I, II dan III
- e. Kumpulan Pidato I, II dan III
- f. Alam Pikiran Yunani
- g. Pengantar ke jalan Ekonomi Sosiologi
- h. Pengantar ke jalan Ekonomi Perusahaan Tanggung Jawab Moral Kaum
Intelegensia
- i. Sekitar Proklamasi
- j. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1 Kebangsaan dan Kerakyatan
- k. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 2 Kemerdekaan dan Demokrasi
- l. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 3 Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial
- m. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia
- n. Bank dalam Masyarakat Indonesia
- o. Ekonomi Terpimpin
- p. Memoir

B. Analisa Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Sebuah ciri khas yang unik serta menjadi benang merah dalam menganalisis pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, adalah sebuah kenyataan bahwa Hatta sangat menekankan moral dan akhlak. Penekanan moral dalam pemikiran ekonominya. Bahkan dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Dan dengan adanya nilai dasar keadilan ini, pemikiran Hatta yang memberikan stressing terhadap penekanan moral seperti larangan mencegah sistem ijon, mencegah penimbunan, serta menganjurkan koperasi untuk menggunakan timbangan yang benar sangat sesuai

dengan nilai yang ada di ekonomi Islam ini. Selain itu, dengan adanya nilai keadilan dalam perekonomian berarti mencegah seseorang berperilaku zalim kepada pihak yang lebih lemah. Dalam Al-Quran secara eksplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia.

1. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *krotos/kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Mengenai masalah demokrasi ini, Hatta sendiri juga sering mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini sendiri diciptakan oleh Hatta. Sebelum Hatta mencetuskannya, belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut *Volkssouvereiniteit*. Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya:

“pada waktu yang akhir ini sering kali orang mengartikan “kedaulatan rakyat”, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan cara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seseorang atau golongan saja dengan tidak ada persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat”.

Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta bukanlah demokrasi yang dipraktikkan negara-negara barat. Hatta menganalisis bahwa revolusi Prancis 1789, yang dikenal sebagai sumber demokrasi barat menyatakan bahwa *trilogi la Liberte, l'Egalitee la Fraternite* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi sembojannya tidak terlaksana di dalam praktik. Karena menurutnya revolusi Prancis meletus sebagai revolusi

individual untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feodalisme, yang mana kemerdekaan individu yang diutamakan. Dalam merealisasikannya orang lupa akan rangkaianannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi Barat, bukan berarti Hatta menerima demokrasi rakyat versi negara komunis, Uni Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan antara mereka, hal inilah tidak ada dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komunisme itu pada dasarnya tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalkan.

Untuk mencapai kedaulatan rakyat, dibutuhkan juga demokrasi yang lain, yaitu demokrasi ekonomi, yang memakai dasar “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula”. Pemikiran Hatta mengenai demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki kemakmuran yang merata keseluruhan rakyat.

Menurut Analisa penulis, setelah membuka kembali pemikiran Mohammad Abdul Mannan dimana Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang bersifat makro maupun mikro. Dan dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam

pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terdapat dua cara yang sangat utama dan fundamental sifatnya, yaitu:

Pertama, pembangunan yang kecil-kecilan dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur, dari kecil, sedang menjadi besar, dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.

Kedua, pembangunan yang besar-besaran dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Dua pembangunan secara nasional ini, terlihat bagaimana demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. Namun, walaupun Hatta hanya mengemukakan secara gamblang dua cara tersebut mengenai pembangunan ekonomi nasional, bukan berarti menepikan pembangunan ekonomi nasional yang lain yang dirintis oleh perorangan. Dalam pemikirannya mengenai hal ini, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi seperti Firma, PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi pembangunan nasional ini. Pengakuan Hatta terhadap usaha pribadi ini menunjukkan Hatta tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga menunjukkan pengakuan Hatta terhadap usaha-usaha dan kepemilikan pribadi.

C. Analisis Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Secara pribadi Hatta tidak hanya seorang politikus tetapi lebih dari itu dia adalah seorang cendekiawan yang tulus, terutama dibidang ekonomi dan hukum tata negara. Hal itu tidaklah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan dibidang tersebut. Dalam bidang ekonomi, Hatta mengeluarkan gagasan mengenai penerapan demokrasi tidak hanya dibidang politik saja, seperti yang diterapkan oleh negara-negara barat. Tetapi juga demokrasi ekonomi dimana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasi oleh orang-perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini rakyatpun mempunyai hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dan pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang juga terbilang fenomenal adalah membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil melalui jalan koperasi. Dalam mengeluarkan gagasan terlihat bahwa Hatta mengambil demokrasi ini sebagai titik tolek pemikiran-pemikiran ekonomi Hatta lainnya.

Adapun pemikiran mengenai keislaman Hatta, termasuk ekonomi Islam walaupun tidak banyak. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah, membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari, siapa yang memahami isi dan memaknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, disitu mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia harus berjuang di atas jalan Allah dan dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk berjuang.

Setelah melihat pandangan Mohammad Hatta tentang ekonomi islam ternyata Terdapat beberapa ayat ekonomi yang menjadi landasan diterapkannya ekonomi kerakyatan dan koperasi oleh Mohammad Hatta. Pemenuhan kebutuhan para anggota/masyarakat tercermin dalam pembagian harta yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, Peruntukan yang hanya tidak diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri saja tetapi penggunaannya harus lebih luas yaitu harta bisa mensejahterakan anggota/masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dalam penggunaan harta ini, beliau membelanjakan untuk keperluan anggota keluarganya, dibagikan kepada masyarakat yang berhak, dan sisanya digunakan untuk berbelanja perlengkapan perang.

Dalam Islam konsep mensejahterakan anggota/masyarakat juga sama dengan tolong menolong (ta'awun) dalam pemenuhan kebutuhan. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Hatta sebagai peletak dasar koperasi, keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Bagaimana konsep keadilan yang hendak diperjuangkan Hatta tersebut? Keadilan yang harus ditegakkan itu kata Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan Ilahi. Keadilan Ilahi ini menurut Hatta baru dapat dilaksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia dan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita. Dari pernyataan ini tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat, berupa kedamaian. Ini artinya keadilan tidak akan bisa tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan ataeksplloitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.

Sebuah ciri khas yang unik serta menjadi benang merah dalam menganalisis pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, adalah sebuah kenyataan bahwa Hatta sangat menekankan moral dan akhlak. Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya bisa dilihat dalam dasar-dasar moral koperasi yang dikemukakan Hatta, yang mana salah satu dari dasar-dasar moral tersebut, Hatta melarang koperasi untuk menjual barang yang palsu, dan memerintahkan untuk penggunaan ukuran timbangan yang benar dan terjamin. Pemikiran lain Hatta yang menekankan moral dan akhlak itu terlihat pula dalam salah satu tugas koperasi seperti memperbaiki distribusi untuk meng-counter pedagang yang menimbun barang, serta menyingkirkan penghisapan seperti menghapus sistem ijon, yaitu sistem jual beli tanaman (terutama padi) yang masih belum masak dan masih di atas pohon.

Tidak hanya penekanan moral dan akhlak, pemikiran Hatta pun sarat dengan nilai-nilai, salah satunya nilai keadilan. Dalam nilai keadilan ini, terlihat benar (apabila kita mengamati pemikirannya), Hatta sangat menggandrungi cita-cita keadilan sosial dalam masalah ekonomi. Hal itu tidak mengherankan, karena lebih dari separuh hidupnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan sudah muak dengan kesengsaraan rakyat Indonesia yang tertindas dan perlakuan diskriminasi rasial dan sebutan “inlander kotor” yang dilakukan oleh kaum imperialis.⁷⁹ Melihat latar belakang tersebut, agaknya bisa dipahami apabila ajaran sosialisme Karl Marx yang menentang eksploitasi dan penghisapan yang dilakukan kaum kapitalis menjadi inspirasi keadilan sosial Hatta disamping ajaran Islam dan demokrasi asli masyarakat Indonesia. Namun, walaupun Hatta menginspirasi Karl Marx, bukan berarti Hatta menerima dengan mentah-mentah ajaran tersebut. Dalam ajaran Karl Marx ini, Hatta jelas-jelas menolak dasar materialisme sebagai pandangan hidupnya.⁸⁰

Keadilan sosial yang merupakan tujuan dari demokrasi ekonomi dan menjadi corak berfikir Hatta, tidaklah berbeda dengan semangat keadilan yang dibawa ekonomi Islam. Bahkan dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Dan dengan adanya nilai dasar keadilan ini, pemikiran Hatta yang memberikan stressing terhadap pekanan moral seperti larangan mencegah sistem ijon, mencegah penimbunan, serta menganjurkan koperasi untuk menggunakan timbangan yang

⁷⁹ Lihat Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1*, h. 87

⁸⁰ Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, h. 15

benar sangat sesuai dengan nilai yang ada ekonomi Islam ini. Selain itu, dengan adanya nilai keadilan dalam perekonomian berarti mencegah seseorang berperilaku zalim kepada pihak yang lemah. Dalam Al-Quran secara ekspilist ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia.⁸¹

Dalam Islam, kelompok ekonomi lemah tidak dipandang sebagai sosok manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi Islam memberikan perhatian dan berpihak kepada mereka yang lemah secara ekonomis. Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usaha ekonomi rakyat hanya dikaitkan dengan satu faktor saja. Sementara sejumlah faktor lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh sama sekali. Faktor ketidakadilan dan model pembangunan misalnya, merupakan dua faktor penghambat bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Ketidakadilan sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha ekonomi rakyat berhasil dianalisis dengan sistematis oleh para sosiolog. Mereka memandang ketidakadilan sebagai penyebab keterbelakangan bahkan kemiskinan dalam suatu masyarakat, baik ketidakadilan dalam pemilikan alat produksi maupun pemerataan hasil produksi. Model pembangunan juga dipandang sebagai faktor usaha yang laik untuk dipertimbangkan. Model pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi akan melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan suatu kelompok masyarakat.⁸²

⁸¹ Muhammad Hatta, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam cet ke-I*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h. 104

⁸² Muhammad Hatta, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam cet ke-I*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h. 106

Mengingat begituesensialnya masalah keadilan, sehingga nabi sendiri dengan tegas melarang para petani di desa-desa melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang kota yang diyakini melakukan tindakan eksploitasi. Dan masalah keadilan inipun diamini oleh ekonom muslim, Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan disamping masyarakat dan pemerintah.⁸³

Lalu masih mengenai perihal keadilan, konsep yang ditawarkan Hatta mengenai penetapan upah minimum yang adil bagi setiap pekerja oleh negara, kurang lebih hampir serupa dengan konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam. Konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam, juga masuk kategori penekanan prinsip keadilan dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tujuan dari penetapan upah yang adil juga dinyatakan seorang pemikir ekonomi Islam masa klasik, Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa tujuan dasar dari upah yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.⁸⁴ Begitu juga dengan Dr. Yusuf Qardhawi, yang mengatakan bahwa pengaturan upah yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerja sama yang baik antara buruh dan majikan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak yang kuat (majikan) terhadap pihak yang lemah (buruh).⁸⁵

⁸³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 203

⁸⁴ Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE, MBA, MAEP, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet ke-III*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 363

⁸⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, Penerjemah Al-Jamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1994), h. 741

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai-nilai lainnya dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah nilai-nilai kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas dan gotong-royong dalam berekonomi, yang mana nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Dalam pemikiran koperasinya, Hatta pun tidak segan-segan mengatakan bahwa persekutuan koperasi adalah sebuah persekutuan keluarga besar.

Sebagaimana halnya dengan pemikiran Hatta, ekonomi Islam juga menekankan kerjasama dan gotong-royong, yang mana dalam ekonomi Islam kerjasama dan gotong-royong termasuk ke dalam bagian nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. Dengan gotong-royong dan kerjasama inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran pada diri orang yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa ia tidak akan mampu berbuat banyak apabila dalam hidupnya tidak terdapat orang lain di sekelilingnya. Kesadaran ini pun menjadi penting dan menjadi benih dalam menumbuhkan semangat tolong-menolong dan persaudaraan terhadap orang saling bekerjasama tersebut. Ibnu Khaldun, seorang sarjana ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa di dalam masyarakat solidaritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga dengan solidaritas tersebut akan meningkatkan produktivitas dalam masyarakat itu sendiri.⁸⁶

Selanjutnya, Hatta mengeluarkan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mau tidak mau, segala aktivitas produksi harus digalakkan. Dengan menggalakkan aktivitas produksi tersebut, berarti negara harus

⁸⁶ Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 203

menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Dalam menaikkan aktivitas produksi bagi negara, terlihat pemikiran yang dikemukakan Hatta, bahwa ia sangat mementingkan kemajuan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menciptakan koperasi sebagai instrumennya. Pemikiran lain Hatta untuk menaikkan aktivitas produksi ialah dengan mengadakan konsep transmigrasi dan pembukaan hutan di tanah seberang. Konsep transmigrasi yang berarti pemindahan penduduk secara besar-besaran bukan berarti pemindahan yang asal-asalan, tetapi pemindahan yang lengkap susunannya, dan terdiri dari berbagai macam spesifikasi profesi dan keahlian.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk.⁸⁷ Rasulullah sebagai kepala negara juga menekankan pentingnya aktivitas produksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan Rasulullah kemudian yang menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad *muzara'ah*, *musaqat*, dan *mudharabah*. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu, Rasulullah Saw, juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi

⁸⁷Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 258

kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum muslimin mengalami peningkatan.⁸⁸

Islam menilai kemajuan ekonomi bukan dengan indikator pertumbuhan GNP (*Gross National Product*), tetapi sejauh mana memberikan peluang-peluang ekonomi yang semakin besar kepada rakyat. Oleh sebab itu, sektor riil lebih diutamakan daripada sektor moneter yang hanya menciptakan perputaran uang diantara kelompok tertentu saja. Hal ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam Islam adalah manusia sebagai prioritas utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam memandang bahwa betapapun berkembangnya ekonomi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia sama saja tidak ada artinya.⁸⁹ Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam aktivitas produksi yang dilakukan harus merata sehingga pada akhirnya perputaran uang di suatu negara pun akan lancar dan seimbang.

Islam juga mengemukakan pandangan pentingnya spesialisasi pekerjaan, Al-Ghazali, cendikiawan muslim masa klasik, juga mengeluarkan pendapat yang serupa dengan Hatta dan turut menekankan pula gagasan mengenai spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan dalam bekerja.⁹⁰ Dalam pandangan Islam penempatan orang harus sesuai dengan bidang yang dimilikinya dan Islam pun melarang untuk menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya : “Apabila sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.⁹¹

⁸⁸Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 152

⁸⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 107

⁹⁰ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 330

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, h. 195

Pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang patut dicermati adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (jaminan sosial) oleh negara, yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ekonomi Islam, jaminan sosial menjadi bagian tersendiri dari nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. Konsep jaminan sosial dalam Islam berarti negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan tiap-tiap individu rakyatnya termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan.

Selanjutnya pemikiran ekonomi yang ditawarkan Hatta yang lain yang cukup menonjol adalah konsep kedaulatan rakyat yang berkenaan dengan penguasaan masalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negara dan dikelola yang mana keuntungan dari pengelolaan tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, dalam kedaulatan rakyat ini, distribusi kekayaan dan barang dalam pandangan Hatta harus merata.

Dalam pandangan Islam, paham kedaulatan rakyat memang sangat luas. Sama dengan Hatta, dalam Islam, dasar musyawarah bukan hanya dilakukan dalam hal politik, tetapi juga meliputi soal-soal ekonomi. Bukanlah hanya pemerintahan dan politik negara saja yang mesti tunduk pada hukum musyawarah, tetapi sistem perekonomian dan pengawasan jalannya kemakmuran rakyat, haruslah tunduk dibawah hukum kedaulatan rakyat.⁹² Oleh karena itu serupa dengan pemikiran Hatta, dalam ekonomi Islam, segala cabang produksi yang menyangkut hajat hidup

⁹² KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, h. 100

orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa segala kekayaan alam yang ada di jagat raya ini pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah, manusia bukanlah pemilik hakiki dari alam ini, akan tetapi manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak kelola. Atas dasar inilah ekonomi Islam tidak membenarkan adanya praktik monopoli, dan merupakan landasan awal dalam hak negara untuk mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemikiran pengelolaan oleh negara ini dalam ekonomi Islam mendapat kedudukan yang sangat penting, yakni termasuk ke dalam nilai dasar pemilikan dalam nilai-nilai dasar yang harus ada dalam ekonomi Islam. Tidak hanya nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, peranan negara dalam mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan juga termasuk nilai-nilai instrumental dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya mengenai pendapat Hatta yang berkenaan dengan bunga bank seperti yang dijelaskan yang di poin sebelumnya, bahwa Hatta menolak apabila bunga disamakan dengan riba, karena menurut Hatta semangat yang dibawa riba adalah semangat konsumtif, bukan semangat produktif. Karena semangat yang dibawa riba adalah semangat produktif, maka Hatta mewajarkan apabila peminjam memungut bunga atas pinjaman yang diberikannya. Hatta melanjutkan bahwa bunga membawa semangat yang membangun (perekonomian), berbeda dengan riba yang membawa semangat menghancurkan (perekonomian) dan riba menurut Hatta sendiri yang dalam hal ini pemungutan imbalan atas pinjaman untuk keperluan konsumtif adalah sesuatu yang dilarang.

Dalam menilai pandangan Hatta dari kaca mata ekonomi Islam ini, maka perlu dianalisis terlebih dahulu mengenai semangat produktif yang dibawa Hatta, dan menilai apakah pandangan Hatta ini terdapat nilai keadilan atau tidak. Dalam menilai pinjaman produktif, ada baiknya apabila penulis mengutip pendapat Afzalur Rahman yang mengungkapkan bahwa dalam pinjaman produktif, yang mana pinjaman tersebut untuk memulai atau membangun suatu usaha, maka hanya terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Lalu bagaimana jika peminjam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian, bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Dan apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari besarnya bunga setiap bulan atau tahun, maka bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagian sedangkan ia sendiri tidak melakukan apa-apa sementara peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktunya, tenaga, kemampuan dan modal pribadinya, setelah pengorbanan itu semua, tidak memperoleh apa-apa.⁹³

Kalaupun keuntungan yang diperoleh peminjam itu lebih besar dari jumlah bunga yang harus dibayarkan, tidak dibenarkan baik dengan akal, rasa keadilan, prinsip-prinsip perdagangan dan ekonomi bahwa pedagang, industrialialis, petani serta faktor-faktor produksi lainnya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, kemampuan dan sumber lain daripada jasmani dan mentalnya, untuk mengeluarkan atau menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan

⁹³ Afzalaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, cet ke-II*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 60

memperoleh keuntungan tidak tetap, sedangkan sang pemberi modal memperoleh jaminan bunga yang tetap dan pasti. Semua pihak mempunyai risiko menderita kerugian, tetapi pemilik modal memiliki jaminan bunga yang pasti. Besarnya keuntungan bagi semua agen mengalami naik turun sejalan dengan perubahan harga bunga tetapi bunga bagi kaum bermodal tetap saja dan dibayar secara tetap setiap bulan atau setiap tahun dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi jika kreditor menginginkan modalnya harus diinvestasikan pada usahauasha yang menguntungkan sehingga memungkinkan ia memperoleh keuntungan, satu-satunya cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan memasuki suatu partnership, dengan bisnisman, dan bukannya dengan meminjamkan modal dengan menarik bunga.

Para pelopor pemikiran yang mengatakan bahwa dengan “menunggu” atau “menahan diri” dalam suatu periode tertentu dan tidak menggunakan modanya sendiri untuk memenuhi keinginannya sendiri, kreditor memberikan “waktu” kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. “waktu” itu sendiri mempunyai “harga” yang meningkat sejalan dengan periode waktu. Jika peminjam tidak diberikan batasan waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal yang dipinjamnya, ia tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan bahkan seluruh bisnisnya bisa hancur karena kekurangan modal. Masa dimana peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai “harga” tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam. Selanjutnya, mereka mengatakan

bahwa kemungkinan naik turunnya keuntungan sejalan dengan naik turunnya waktu dan tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh mengenakan harga (waktu) sesuai dengan lamanya waktu.⁹⁴ Tetapi lagi-lagi pertanyaan bagaimana dan dari mana sumbernya kreditor itu mendapatkan informasi bahwa peminjam itu nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu? Bagaimana ia mengetahui bahwa peminjam itu akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu ia menetapkan bagian keuntungan tersebut? Dan bagaimana dapat memperhitungkan bahwa peminjam pasti akan memperoleh keuntungan yang begitu banyak selama masa modal digunakannya sehingga ia akan membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun? Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban masuk akal terhadap masalah tersebut.

Senada dengan pendapat Afzalur Rahman, Ibrahim Lubis, secara lebih gamblang mempertanyakan pendapat Hatta, yaitu bagaimana jika kreditor mengalami kerugian, apakah dalam hal ini, kreditor harus membayar juga bunganya kepada debitur (bank)? dan maukah yang mempunyai uang (bank) tak mau ikut rugi atau maukah ia hanya terima uangnya yang pinjamkan itu saja? Dalam praktiknya tentu si debitur (bank) tak mau ikut rugi dan ia tak mau menerima begitu saja, ia harus minta lagi tentunya, ia tak mau tahu apakah orang itu rugi atau untung dan ia hanya tahu bahwa uangnya dalam jangka masa yang tertentu harus mendapatkan bunga sekian persen. Dan kalau ia tidak menuntut haknya memungut bunga itu,

⁹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, cet ke-II*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 60

tentu bukan bank namanya dan tentu bertentangan dengan moneter ekonomi yang dalam teorinya, mengeluarkan tenaga yang sedikit dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹⁵

Lalu mengenai pendapat Hatta, yang mengatakan bunga membawa semangat yang membangun, menurut penulis Hal ini tidaklah benar dan relevan. Para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empiris, bahwa bunga mengandung kemudharatan dan membawa semangat yang menghancurkan. Afzalur Rahman dalam bukunya, "Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3", mengatakan bahwa paling tidak terdapat 4 keburukan dari adanya praktik bunga bank⁹⁶ yaitu:

1. Adanya tingkat bunga yang tinggi menghancurkan minat untuk berinvestasi. Ketika tingkat investasi jatuh, maka kesempatan kerja dan pendapatan pun akan menurun. Sebagai akibat menurunnya jumlah pendapatan maka akan menyebabkan tingkat konsumsi agregat menjadi turun. Kita mengetahui bahwa konsumsi merupakan satu-satunya tujuan dari seluruh kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, suatu penurunan tingkat investasi, juga berarti penurunan kesempatan kerja akan mengurangi permintaan terhadap barang serta produk-produk industri dan pertanian dalam suatu negara. Akibatnya, kemajuan perdagangan dan industri sekaligus pertumbuhan modal di negara tersebut akan terhambat. Hal itu tidak mengherankan, karena bunga atas modal merupakan penghambat produktivitas. Bunga, dalam bahasa ilmiah, merupakan hambatan terhadap efisiensi marginal modal. Apabila efisiensi

⁹⁵ Drs.H.Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 2, cet ke-I* (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), h. 527

⁹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, h. 124-132

marginal modal berkurang hal itu akan menjadikan beberapa sumber yang produktif terbengkalai. Dua akibatnya yaitu di satu pihak, terbatasnya penggunaan sumber-sumber yang produktif menurunkan jumlah barang yang diproduksi. Dengan adanya pungutan bunga, biaya marginal produksi menjadi naik. Dengan demikian, barang-barang yang diproduksi harus dijual dengan harga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang.

2. Para ahli ekonomi beranggapan bahwa uang yang mengendap di bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha industri dan komersial. Tetapi dalam praktiknya anggapan tersebut, menurut Afzalur Rahman, tidaklah benar. Karena sebagian aset bank dialirkan pada usaha-usaha non produktif, seperti berinvestasi dengan surat-surat jaminan pemerintah, menggunakan uang untuk tujuan spekulatif dan tagihan tunai. Bersamaan dengan itu bank cenderung membatasi banyaknya orang yang ingin menginvestasikan uangnya secara langsung di bidang industri dan komersial. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal yang tersedia yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif.
3. Bunga menghancurkan kekayaan dengan berbagai cara. Bunga membantu timbulnya krisis ekonomi di dunia kapitalis. Hal ini terjadi ketika ada penumpukan barang karena rendahnya daya beli dan adanya rendahnya kecenderungan konsumsi. Proses produksi menjadi terhambat dan menyebabkan pengangguran. Selagi keadaan ekonomi terus melambung, sejumlah besar uang dipinjamkan dengan bunga yang diinvestasikan pada

usaha yang produktif akan memberikan hasil yang mencukupi. Optimisme yang berlebihan meningkatkan permintaan dan pinjaman dan akhirnya menaikkan suku bunga. Optimisme akan berakibat pada spekulasi dan terus berspekulasi. Semua ini menaikkan suku bunga, margin keuntungan akan semakin sedikit tetapi produsen dengan penuh keyakinan terus memproduksi. Secara berangsur-angsur keraguan mulai timbul berkaitan dengan hasil produktif ketika stok barang tahan lama, akan bertambah secara tetap. Kemudian kebimbangan tersebut akan berkembang dengan cepat. Karena takut mengalami kerugian, bank menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mencoba untuk menarik kembali pinjaman yang telah diberikan pada waktu lalu. Dengan demikian akan menimbulkan kepanikan di kalangan dunia usaha sekaligus meningkatkan pengangguran. Dalam situasi demikian, aktivitas akan terhenti dan di pasar hanya akan ada timbunan barang yang tidak ada peminatnya. Oleh karena adanya suku bunga yang tinggi, harga barang melambung sementara efisiensi marginal modal menyusut sebagai akibat kegiatan spekulasi dan lainnya, sehingga keuntungan akan merosot. Jatuhnya efisiensi marginal modal tidak diragukan lagi merupakan dasar timbulnya masalah krisis tetapi kenaikan suku bunga merupakan biang keladi timbulnya seluruh persoalan tersebut. Dengan jatuhnya efisiensi marginal modal dibanding dengan naiknya biaya sebagai akibat dari naiknya tingkat bunga, tingkat investasi menjadi menurun. Apabila tidak ada pungutan bunga efisiensi marginal modal dalam berbagai

tingkat akan memberikan keuntungan dan segala macam krisis tidak akan timbul.

4. Bunga juga memusnahkan kekayaan negara. Ini biasa dialami di negara-negara kapitalis, dimana produsennya bermaksud menghancurkan barang jadi dalam jumlah yang besar bahkan hasil-hasil pertanian dengan tujuan menyelematkan harga dari kejatuhan dibawah biaya marginal produksi. Kerugian negara dalam jumlah besar sementara berjuta orang menderita kelaparan dan kekurangan keperluan lain akan karena rendahnya daya beli. Hal ini dapat dihindarkan dengan menghapus tindakan sistem bunga. Tindakan ini tidak hanya akan menurunkan marginal produksi malahan akan meningkatkan investasi yang sekaligus menaikkan daya beli masyarakat.

Dari penilaian yang diuraikan diatas terhadap pemikiran Hatta mengenai bunga bank tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Hatta yang satu ini bertentangan dari kacamata ekonomi Islam.

Tetapi tidak adil rasanya, kalau kita dengan serta merta menghujat Hatta, untuk pemikirannya yang satu ini. Bahkan penulis menganggap, disinilah letak kebesaran pribadi seorang Hatta, ketika ia mendapati jalan pembangunan itu hanya dapat ditempuh dengan mendirikan bank, ia tidak serta merta lari dan menafikan bunga tersebut, ia juga tidak melakukan perbuatan seperti politisi pada umumnya yang mengeluarkan pendapat mengenai bunga bank ini dengan pendapat yang abu-abu, ia secara jantan menghadapi dilema tersebut dan mencoba berijtihad dengan mempelajari asal-muasal riba itu diharamkan dan alasan mengapa bunga itu diharamkan sehingga sampailah ia sebuah keputusan yang sulit, penulis kira, yaitu

bunga bank tidaklah sama dengan riba. Namun walaupun begitu, penulis meyakini, seandainya Hatta bisa melihat keadaan saat ini, dimana bank pun bisa beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, penulis kira, Hatta pun akan kembali menarik ucapannya. Karena bagi seorang intelektual seperti Hatta, dia akan dengan legowo mengakui bahwa dia akan mengakui bahwa teorinya yang telah diyakininya disanggah dengan suatu teori yang lebih benar dan relevan.⁹⁷

Selanjutnya menurut penulis, untuk menilai Hatta secara utuh, kita harus melihat juga kondisi sosial dan ekonomi yang semasa kehidupan Hatta dahulu. Pada masa Hatta dahulu, Indonesia saat itu sangat miskin, terbelakang akibat penjajahan yang mendera bangsa ini berabad-abad lamanya. Negara yang masih miskin ini tentu untuk menyelenggarakan pembangunan harus memerlukan sebuah modal awal, dan fungsi untuk mengumpulkan modal yang besar ini hanya dapat diemban oleh bank, sementara pada masa dahulu, praktik mudharabah belum dikenal seperti masa sekarang ini. Melihat keadaan tersebut, maka wajarlah rasanya apabila Hatta pun berpendapat bahwa untuk menuju kemakmuran, negeri ini harus mendirikan sebuah bank.

Kemudian dalam memandang bunga yang menjadi instrument dalam bank ini bukan berarti Hatta menafikan keberadaannya, terlihat dalam didalam bukunya yang berjudul “Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan keEkonomi dan Bank”, Hatta memberikan perhatiannya yang cukup besar terhadap bunga (apakah dapat

⁹⁷ Lihat, Mohammad Hatta, *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelegensia, cet ke-II*, (Bandung : Angkasa, 1966), h. 11

disamakan dengan riba atau tidak) yaitu sebanyak 3 bab dari keseluruhan buku tersebut yang sebanyak 15 bab.

Apabila kita membaca buku tersebut, tampak jelas bahwa Hatta mengalami pergolakan batin yang begitu dalam, serta menjalani perenungan yang cukup panjang. Sebagai muslim yang taat, ia menyadari bahwa praktik riba adalah sesuatu yang dilarang, akan tetapi ia memerlukan suatu bank untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa ini. Oleh karena itu, ia mempelajari aspek sosiologis dan historis, mengapa riba tersebut diharamkan, dan ia menyimpulkan bahwa pada masa dahulu pinjaman riba digunakan hanya untuk kepentingan konsumsi, bukan untuk produksi serta terlebih lagi riba pada masa dahulu merupakan gerbang dari awal pintu perbudakan. Dengan berdasarkan kesimpulan tersebut dan disebabkan juga, belum menjamurnya praktik mudharabah seperti dewasa ini, maka Hatta pun berijtihad bahwa bunga bank merupakan suatu yang hal yang berbeda dengan riba, dan menjadi halal hukumnya, serta secara tegas ia mengungkapkan bahwa siapapun yang menolak bunga, maka lebih baik ia menolak sebuah kemajuan.

Dengan memperhatikan kesimpulan Hatta tersebut, serta juga melihat kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu, maka tidak aneh apabila Hatta mengungkapkan kritiknya terhadap praktik bank Islam yang menggunakan ongkos administrasi dalam operasionalnya. Dalam masalah ongkos administrasi ini, penulis sepakat dengan pendapat Hatta yang mengatakan itu tidak ada bedanya dengan praktik bunga pada umumnya (yang tentu dinilai riba), karena ongkos administrasi pada hakikatnya hanya merupakan kamufase saja untuk mendukung praktik riba yang dilakukan oleh bank Islam tersebut.

D. Relevansi Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat Ini

Dalam memainkan perannya sebagai founding father negeri ini, Hatta telah berupaya keras untuk mengkonsep perekonomian yang cocok dengan kondisi yang relevan dengan bangsa ini. Dalam mengeluarkan gagasannya, terlihat Hatta sangat memperhatikan kepentingan negeri ini dalam jangka panjang. Konsep kedaulatan rakyat dalam ekonomi atau juga dikenal dengan demokrasi ekonomi dalam menjadi tolak berfikir Hatta menekankan bahwa rakyatlah yang memegang kendali produksi melalui instrumen koperasinya.

Selama ini keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat : Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana

aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.⁹⁸

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada 'tingkat' yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Macam-macam jenis produk Koperasi :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

⁹⁸http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_4.htm diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pendapatan koperasi. Sisa Hasil Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Cara mengitung SHU sebagai berikut :

1. Suatu koperasi kredit pada tanggal 31 Mei mempunyai data sebagai berikut:

- Jumlah Anggota 30 orang
- Jumlah simpanan anggota Rp. 1.500.000
- Jumlah SHU Rp. 500.000
- Jumlah kredit yang dikeluarkan Rp. 4.000.000 (untuk anggota)

Koperasi tersebut belum mengeluarkan kredit untuk bukan anggota.

Dari data tersebut maka SHU akan dibagi sebagai berikut:

a. Untuk cadangan :

$$25\% \times 500.000 = \text{Rp. } 125.000$$

- b. Untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi:

$$30\% \times 500.000 = \text{Rp. } 150.000$$

- c. Untuk anggota menurut perbandingan simpanannya:

$$15\% \times 500.000 = \text{Rp. } 75.000$$

- d. Untuk dana pengurus:

$$10\% \times 500.000 = \text{Rp. } 50.000$$

- e. Untuk dana pegawai:

$$5\% \times 500.000 = \text{Rp. } 25.000$$

- f. Untuk dana pendidikan dan penyuluhan koperasi:

$$5\% \times 500.000 = \text{Rp. } 25.000$$

- g. Untuk dana pembangunan daerah kerja:

$$5\% \times 500.000 = \text{Rp. } 25.000$$

- h. Untuk kedua pegawai/karyawan:

$$5\% \times 500.000 = \text{Rp. } 25.000$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 500.000$$

Dari perhitungan diatas SHU harus dibagikan kepada anggota ialah:

1. Menurut perbandingan jasanya : Rp. 150.000
 2. Menurut perbandingan simpanan : Rp.75.000
- Jumlah : Rp. 225.000

Cara menghitung pembagian SHU tiap-tiap anggota, contoh:

Seorang anggota mempunyai simpanan sebesar Rp. 50.000 dalam waktu satu tahun anggota tersebut telah mendapat kesempatan pinjam sebesar Rp. 150.000, untuk anggota tersebut akan menerima SHU :

$$1. \text{ Menurut jasanya : } \frac{\text{Rp. 100.000} \times \text{Rp. 150.000}}{\text{Rp. 4.000.000}} \\ = \text{Rp. 3.750.}$$

$$2. \text{ Menurut simpanan : } \frac{\text{Rp. 500.000} \times \text{Rp. 75.000}}{\text{Rp. 1.500.000}} \\ = \text{Rp. 500}$$

$$\text{Jumlah} \quad = \text{Rp. 4.250.}$$

Jadi yang diterima Anggota sebesar Rp. 4.250.

Dari perincian SHU diatas jelas bahwa pembagian tersebut relevan dengan kode etik ekonomi islam yaitu tidak ada untuk perjudian, penipuan dan manipulasi. Hal tersebut dilarang Allah Swt.⁹⁹

Dengan adanya koperasi Hatta jelas sangat memperhatikan keberadaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain dan terbukti ekonomi rakyat dengan koperasi sebagai instrumennya mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997.

Hatta dalam menyiasati pembangunan negeri ini pun tidak alergi dengan masalah utang luar negeri akan tetapi utang luar negeri ini haruslah dikenai syarat-syarat yang disebutkan oleh Hatta di poin sebelumnya dan dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, seperti untuk masalah transmigrasi, industrialisasi, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya.

⁹⁹ Dr. Itang, M. Ag, *Pemikiran Ekonomi koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan etika ekonomi islam*, (Serang : Laksita Indonesia, 2016), Cetakan Ke II, Hal. 123

Namun pada praktiknya, yaitu pada masa orde baru, masalah utang luar negeri ini yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat mengalami penyimpangan. Tanpa perhitungan matang, tanpa memperhitungkan untung ruginya dan terlebih lagi tidak mempunyai niat untuk menyumbangkan bagi peningkatan produktivitas ekonomi Indonesia, pengusaha Indonesia secara membabi buta mengambil kredit-kredit yang disodorkan dari luar negeri. Inilah yang menyebabkan Indonesia saat ini terbebani utang yang luar biasa besarnya, sebagian besar utang swasta kepada modal luar negeri, jumlah tersebut berkisar sepertiga dari seluruh produksi nasional. Utang sebanyak itulah yang mengancam ekonomi Indonesia saat ini, karena sifatnya adalah kredit singkat, maka jatuh temponya dekat dengan bunga yang luar biasa tinggi.¹⁰⁰

Pertengahan tahun 1998 sudah lebih dari 50 miliar dollar jatuh tempo, sedangkan uang pembayarannya tidak ada. Demikianlah salah satu sumber terjadinya krisis moneter yang kita alami. Lebih parah lagi, kebanyakan dari kredit tersebut diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak produktif dan jauh dari kepentingan rakyat. Bahkan dapat dikatakan, lebih kurang 74 miliar dollar yang dipakai pengusaha Indonesia hampir sepenuhnya tidak bermanfaat untuk 80 % penduduk Indonesia. Utang ini adalah penumpukan kekayaan luar biasa dan terkonsentrasi pada salah satu kelompok yang sangat kecil di sekitar penguasa.

Dasar kepentingan rakyat inilah yang juga seharusnya digunakan dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

¹⁰⁰ Prof.Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cetakan Ke-I, h. 10.

Namun apa yang terjadi, segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di negeri ini, baik itu berbentuk migas maupun non migas hanya ditujukan untuk pribadi dan golongan tertentu. Bahkan yang lebih parah lagi, eksploitasi negeri ini banyak didominasi untuk menunjang kepentingan asing eksploitasi.

Rakyat negeri ini hanya menjadi penonton. Rumah dan lingkungan yang telah mereka diami selama turun-temurun, harus tercemar oleh limbah dan pabrik atas eksploitasi tersebut, sementara mereka tidak mendapat bagian apapun dari kekayaan alam yang dirampok dari tanah mereka.

Hal inilah harus dihentikan. Mengacu pada pandangan Hatta, sudah saatnyalah eksploitasi sumber daya alam di negeri ini harus berorientasi pada asas kerakyatan dan untuk kepentingan rakyat banyak.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah sebagai wakil rakyat diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada yang memberinya mandate (rakyat) secara adil. Negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan tiap-tiap individu rakyatnya termasuk pelayanan public seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Peran ini merupakan kebijakan mendasar dalam ekonomi Islam.

Selain peran tersebut, Negara harus berperan untuk menjamin pendistribusian kekayaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan (transparan) dan kejujuran. Sebaliknya memerangi perilaku ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti pemungutan riba, melarang penimbunan kekayaan, penimbunan barang yang mengancam kewajaran harga pasar, pemilikan harta umum oleh individu (*individual ownership*), kepemilikan

kelompok/umum (*Collective ownership*) dan kepemilikan Negara. Kepemilikan umum berkaitan dengan 1) segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital rakyat, ketiadaan kebutuhan vital ini akan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak berjalan secara baik seperti air, dan sumber energi (gas, listrik, minyak bumi, tambang dan batu bara dan lain-lain) 2) berbagai komoditas yang secara alamiah tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti lautan, sungai, taman umum, jalan umum maupun alat transportasi lainnya 3) barang tambang yang depositnya melimpah dalam jumlah besar, seperti sumber daya mineral (garam, besi, emas, perak, timah dan lain-lain). Negara juga bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum untuk kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan Negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif seperti keleluasaan kerja dan peningkatan profesionalitas yang tinggi. Dalam persepektif Islam Negara bertugas untuk melakukan pengurusan seluruh urusan rakyat. Dengan segala kewenangan yang diberikan kepadanya, Negara harus berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Kewenangan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak saja dihadapan rakyat tetapi juga dihadapan ALLAH kelak. ¹⁰¹Pemerintah adalah pelayan rakyat, dia bertanggungjawab atas rakyat yang dilayaninya, demikian sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah.

Menyadari pentingnya nilai keadilan dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, islam meletakkan keadilan sebagai dasar *muamalah iqtishadiyah*

¹⁰¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hal 104

(perekonomian). Keadilan berarti setiap pihak, kelompok atau individu memperoleh porsi sesuai kemauan dan keinginan mereka untuk berkembang sekaligus mencegah perilaku zalim kepada pihak yang lemah, kelompok atau individu memperoleh porsi sesuai kemauan dan keinginan mereka untuk berkembang sekaligus mencegah perilkuzalim kepada pihak yang lemah. Dalam al-quran secara ekspilsit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal. Keadilan adalah kualitas instrinsik yang melekat dalam diri manusia.

Dengan nilai dasar ketidakadilan, kegiatan perekonomian dalam Islam bisa membatasi kekuatan perekonomian seseorang yang berindikasi melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Ketidakadilan tidak bisa dibiarkan karena menyebabkan ketimpangan-ketimpangan dalam sendi-sendi kehidupan manusia, seperti membuka peluang kegiatan monopoli.¹⁰²

Nabi semasa tinggal di madinah membela para petani di desa-desa, melarang jual beli antara kota dengan petani di desa-desa dimana saat itu petani yang tinggal di desa sedikit memiliki informasi tentang harga. Seharusnya mereka mempunyai informasi cukup supaya orang kota tidak membeli barang didesa dengan harga semurah-murahnya dengan maksud meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Selain itu nabi juga melarang menumpuk harta (ihktikar) dengan maksud menjualnya disaat tertentu nanti dengan harga mahal. Islam juga melarang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh serta melarang penumpukan kekayaan.

¹⁰²Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hal 105

Dalam islam kelompok ekonomi lemah, tidak dipandang sebagai sosok manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi islam memberikan perhatian dan berpihak kepada mereka yang lemah secara ekonomis. Dengan demikian anggapan bahwa kondisi keterbelakangan dan kelemahan yang dialami oleh usaha ekonomi rakyat tidak lebih disebabkan oleh tantangan internal termasuk lemahnya etos kerja pengelolanya tidak dapat diterima. Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usaha ekonomi rakyat hanya dikaitkan dengan satu faktor saja. Sementara sejumlah faktor lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh samasekali. Faktor ketidakadilan dan model pembangunan misalnya, merupakan dua faktor penghambat bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Ketidakadilan sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha ekonomi rakyat berhasil dianalisis dengan sistematis oleh para sosiolog. Mereka memandang ketidakadilan sebagai penyebab keterbelakangan bahkan kemiskinan dalam suatu masyarakat, baik ketidakadilan dalam pemilikan alat produksi maupun pemerataan hasil produksi. Model pembangunan juga dipandang sebagai faktor usaha yang layak dipertimbangkan. Model pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi akan melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan suatu kelompok masyarakat.

Hal ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam islam adalah manusia sebagai prioritas utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam memandang bahwa betapapun berkembangnya ekonomi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia samasaja tidak ada artinya. Dengan landasan seperti diuraikan diatas, jelas bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat dalam

perspektif islam dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yaitu mencapai kemakmuran material secara selaras dengan peningkatan stamina spiritual. Perpaduan dari kedua aspek inilah yang menjadi konsep kesejahteraan yang membawa kepada kebahagiaan dalam Islam.¹⁰³

Setiap individu berhak atas penghidupan di Negara Islam. Dan setiap warga memiliki jaminan atas kebutuhan pokoknya. Sesungguhnya tugas dan tanggung jawab utama Negara Islam untuk mengawasi setiap warga memperoleh kebutuhan pokoknya menurut prinsip “hak atas penghidupan” dan dalam hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok. Seluruh warganya dalam kedudukan yang sederajat. Penerus rasulullah saw, abu bakar, pemerintahannya sangat ketat dalam menempuh jaminan rakyat yang diciptakannya. Umar, khalifah yang kedua, lebih memperluas dan mengembangkan departemen jaminan umum. Ia memberikan jaminan dan dana umum kepada seluruh warga yang miskin dan kekuarangan, tanpa membedakan warna kulit danagamaanya. Seluruh rakyat, Islam, Yahudi, Kristen dan semuanya memperoleh bantuan dana darinya. Ia memberikan dana untuk anak-anak, penganggur dan usia lanjut dan membantu orang miskin dan kekurangan yang sakit dan cacat dengan berbagai jenis jaminan untuk memenuhi keuangan mereka. Setelah umar, departemen jaminan sosial dipertahankan dengan baik oleh usman, khalifah yang ketiga dan ali, khalifah yang keempat, yang memberikan bantuan kepada kalangan miskin dan mereka yang dipandang layak dibantu bagi warga

¹⁰³Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.107

Negaranya. Peraturan umum diberlakukan selama pemerintah Abu Bakar, khalifah pertama setelah nabi Muhammad, yang mengandung pokok-pokok, “Saya menjamin hak mereka bahwa jika seseorang menjadi tidak mampu karena usia lanjut atau mengalami sesuatu musibah atau kecelakaan atau kemalangan dan menjadi miskin, ia akan terbebas dari jizyah (atau pemungutan pajak lainnya). Ia dan keluarganya akan memperoleh dana perawatan dari dana umum selama ia tinggal di Negara Islam. Tetapi jika ia telah meninggalkan Negara ini, Negara Islam tidak lagi bertanggung jawab akan perawatan keluarganya”.¹⁰⁴Aturan yang sama masih dilanjutkan pada masa pemerintahan Umar, khalifah kedua, yang lebih memperkokohnya dengan mendasarkan peraturan tersebut pada ayat suci AlQur’an. Ia menuliskan kepada para pengurus dana masyarakat bahwa si miskin yang dimaksudkan adalah orang-orang miskin diantara orang yahudi dan Kristen (karena hanya mereka, non muslim yang tinggal di Negara Islam tersebut) di dalam ayat AlQur’an disebutkan amal bantuan itu diperuntukkan bagi orang miskin dan kekurangan.

Rasulullah juga memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap muslim dan menanamkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh, Rasulullah memerintahkan Zayd bin Tsabit yang telah diajarkan membaca dan menulis oleh seorang tawanan perang Badar, untuk mempelajari tulisan yahudi. Rasulullah juga menyatakan kepada sepuluh orang pemuda Anshar membaca dan menulis, mereka akan dibebaskan.

¹⁰⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 316

Dengan cara ini, jumlah sahabat yang melek huruf meningkat sehingga juru tulis dan baca Rasulullah Saw tercatat sebanyak 42 orang. Angka ini sangat berarti dibandingkan dengan sebelum masa kenabian, jumlah suku Quraisy yang melek huruf hanya 17 demikian juga di Madinah, kecuali bangsa Yahudi, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis sangat sedikit. Al-Waqidi mengatakan jumlah itu hanya sebelas orang. Gerakan belajar membaca dan menulis di Madinah menyebar luas sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Darul Qurra (Rumah Para Penulis). Rasulullah juga memberi perhatian sangat besar pada masalah kesehatan. Salah satu hadis Rasulullah yang paling terkenal adalah “kebersihan sebagian dari iman” membuktikan hal itu. Ini selaras dengan hadis lain yang mengatakan “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku mewajibkan mereka menggosok gigi setiap kali shalat.” Disamping itu, untuk mencegah penyebaran penyakit, Rasulullah memerintahkan agar orang yang sakit dikarantina sampai sembuh. Berdasarkan empat puluh kebiasaan Rasulullah yang berisikan perintah dan imbauan kesehatan, Ibnu Tarfan menyusun sebuah buku berjudul *The Prophet's Precepts on the Art of Medicine* yang terbagi kedalam sepuluh bab. Semua yang disebut diatas merupakan indikator besarnya perhatian Rasulullah terhadap ilmu kedokteran dan kebersihan. Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah ditujukan untuk megerahkan sumber daya demi kesehatan dan pengajaran. Dengan cara ini kaum muslimin cepat belajar sehingga para ahli kedokteran muslim memperoleh pengakuan yang berarti di bidang ini. Superioritas kaum muslimin di bidang medis, kimia dan ilmu pasti lainnya pada masa Imam Ja'far Al-Sadiq dan Ali Al-Rida juga diakui.

Selain itu, Rasulullah juga menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqat, dan mudharabah. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Rasulullah Saw, juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum muslimin mengalami peningkatan.

Ketikaberbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pembangunan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syabani menegaskan bahwa kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut :

1. FirmanAllah

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Q.s (Al-Jumu'ah : 10).

2. Hadist Rasulullah

“Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim”

3. Amirul mu'minin Umar bin Khattab lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha sebagian karunia Allah Swt di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunianya daripada para mujahidin melalui firman-Nya :

...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang lain lagi yang berperan di jalan Allah...(Al- Muzzamil : 20)

Selanjutnya Al-Mawardi berpendapat bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan public merupakan kewajiban sosial (fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Menurut Al-Mawardi, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Lebih jauh Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam hal sumber-

sumber pendapatan Negara atau terjadi defisit anggaran, Negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melaksanakan pinjaman kepada publik.

Ibnu Taimiyah menggunakan istilah upah yang setara dan adil. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.

Islam memberi banyak penekanan pada pengaturan dan penggunaan kekayaan tersebut. Manusia dianjurkan untuk menjaga harta benda mereka dengan hati-hati dan membelanjakannya secara adil dan bijaksana agar keinginan-keinginan yang diharamkan itu terpenuhi (terpuaskan).¹⁰⁵

Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan utility atau nilai gunaresources tidak disukai dalam Islam. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain.¹⁰⁶

Umat Islam wajib mengembangkan sistem pengajaran dan pelatihan yang mempersiapkan kemampuan dan potensi manusia pada berbagai bidang yang dibutuhkan. Hendaknya dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan agar berbagai sumber daya manusia ini dapat dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan agar berbagai sumber daya manusia ini dapat dikembangkan,

¹⁰⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 24

¹⁰⁶ Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE, MBA, MAEP, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103

dialokasikan dan didistribusikan untuk berbagai spesialisasi secara seimbang dan tepat, sebagaimana petunjuk yang diberikan dalam Al-Qur'an :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢ ﴾

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (At-Taubah : 122)

Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia, baik berkaitan dengan akal, jasmani, rohani, keilmuan maupun keahlian. Sehingga keseimbangan antara agama dengan dunia akan terjadi, tanpa melampaui batas ataupun merugikan salah satunya.

Orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin diantara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin (bait al-mal) tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.¹⁰⁷

Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat, pemerintah dan keadilan. Didalam

¹⁰⁷ Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Cetakan ke-1,* (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), h.141

masyarakat, solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerjasama, sehingga akan meningkatkan produktivitas.¹⁰⁸

¹⁰⁸Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Cetakan ke-1*,(Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), h.203

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun pandangan Mohammad Hatta tentang Ekonomi Islam ialah Menurut Muhammad Hatta sebagai inti dari Ekonomi Islam yang dijadikan peletak dasar pemikirannya ialah keadilan. keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
2. Mengenai relevansi pemikiran Hatta ternyata sampai saat ini yakni koperasi dan masih memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, hal ini dibuktikan sebagai berikut: *Pertama*, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota, dimana setiap akhir tahun akan ada pembagian SHU (sisa hasil usaha) yang mana SHU ini merupakan keuntungan bagi setiap anggota. *Kedua*, menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti halnya ekonomi islam. *Ketiga*, meningkatkan taraf hidup masyarakat,

dimana masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. *Keempat*, turut mencerdaskan bangsa, dimana dalam koperasi ini bukan hanya kegiatan material saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan bagi para anggota. Pendidikan ini ditujukan untuk memperbaiki keterampilan bagi para anggotanya. *Kelima*, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha, dimana koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis dikemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis terhadap Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang mana penelitian ini dilakukan untuk membuka kembali pemahaman terkait pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh terdahulu sehingga dalam kedepanya bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian yang bertujuan memperdalam keilmuan tentang ilmu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Multi Pressindo, 2010
- _____, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Ali Zainuddini, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Astarus Jakarta, 2005.
- Dealiarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasmawati, *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol.V, No.5, Tahun, 2018
- Hadi,Sutrisno,*Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hatta, Mohammad, (Emil Salim, dkk, Penyunting), *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 2, Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2000
- _____, (Emil Salim, dkk. Penyunting), *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1 Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta : LP3ES, 1998
- _____, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963.
- _____, *Beberapa Pasal ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960.
- _____, *Demokrasi kita*, Bandung: Segarsy, 2014.
- _____, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan*, Jakarta, UI Press, 1980.
- _____, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku I, Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama, 1998.
- _____, *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*, Jakarta : PT Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971.
- _____, *Kumpulan Pidato I*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2022.

_____, *Kumpulan Pidato II*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2002

_____, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam cet ke-I*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

_____, *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelegensia, cet ke-II*, Bandung: Angkasa, 1966.

_____, Tanjung M Azrul, *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta diakses pada tanggal 05 Agustus 2023

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta diakses pada tanggal 05 Agustus 2023

<http://www.grelovejogja.wordpress.com/2006/12/09/mohammad-hatta/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

http://dimel2002.multiply.com/journal/12/Teori_Penawaran_Islami. Diakses tanggal 5 September 2023

<http://dedysupriatman.blogspot.com/2012/05/distribus-pendapatan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 5 September 2023

Karim, Adiwarmanto A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet ke-III*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Limbong, Bernhard, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2013

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 2, cet ke-I*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995

Malau, Natalia Artha, *Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Research Sains, VoL.2 No.1 Januari, 2016*

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997

- Noer, Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta : LP3ES, 1990
- Putra, Adnan Husada, Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2016
- Qardawi, Yusuf, Penerjemah Al-Jamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr Yusuf Qardhawi*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1994
- Rahman, Afalaur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf, 1995
- _____, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, cet ke-II*, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rizal, Sofyan, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, 2011
- Rose, Mavis, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum pengembangan dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- _____, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Sutrisno, Noer, *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: STEKPI, 2005
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009
- Suyono, Akhmad, Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol .9 No 2, 2021
- Swasono, Meutia Farida, *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, 1980
- Swasono, Sri Edi, *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, Yogyakarta: UST-Press, 2015
- Tanjung, M Azrul ,*Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga 2016
- Wilson, Deirde Teori Relevansi, *Komunikasi dan Kognisi*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2009



Jurnitinn DONE SKRIPSI KHOIRUL FIX

ORIGINALITY REPORT

27%

ORIGINALITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	14%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Mataram Student Paper	1%
7	alimerdiansah.blogspot.com Internet Source	<1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1%

0	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
1	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
2	muhfathurrohman.wordpress.com Internet Source	<1 %
3	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
5	henihendrayani.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
7	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
8	Nurmala N Sabon, Lamondo Lamondo. "Analisis Pemikiran Koperasi Bung Hatta dan Korelasinya", Robust: Research of Business and Economics Studies, 2022 Publication	<1 %
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	123dok.com	